

LAPORAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PELAIHARI
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan hidayah – Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran Strategis dengan beberapa kendala, serta langkah perubahan kedepan.

Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran dan analisis capaian indicator kinerja utama (IKU) serta komponennya.

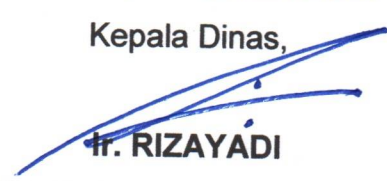
Capaian kinerja diukur atas dasar penilaian indicator kinerja utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2021

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh aparat yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kritik dan saran senantiasa Ikami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya dan semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta informasi dalam mewujudkan good governance dan clean governance

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Dinas,



H. RIZAYADI

NIP 19621104 199403 1 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	11
D. Produk dan Layanan	13
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Visi RPJMD	16
B. Misi RPJMD	16
C. Tujuan	17
D. Sasaran Strategis	17
E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)	18
F. Indikator Kinerja Utama	19
G. Perjanjina Kinrja	20
H. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	27
1. Sasaran RPJMD	27
2. Eselon II	29
3. Eselon III Sekretaris	32
3.1 Eselon IV (Kasubag Perencanaan)	33
3.2 Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	34
3.3 Eselon IV (Kasubag Keuangan)	37
4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan)	37
4.1 Eselon IV (Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)	38
4.2 Eselon IV (Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan)	46
5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)	49
5.1 Eselon IV (Kasi Konsumsi ddan Penganekaragaman Pangan)	56
5.2 Eselon IV (Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan)	62

6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan	70
6.1 Eselon IV (Kasi Perikanan Budidaya)	75
6.2 Eselon IV (Kasi Penguatan Daya Saing Produksi Kelautan dan Perikanan)	84
7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)	86
7.1 Eselon IV (Kasi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan)	88
7.2 Eselon IV (Kasi Sarana dan PrasarananPenangkapan)	89
B. Akuntabilitas Keuangan	93
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Strategi Peningkatan Kinerja	100
LAMPIRAN	
Lampiran 1.....	102
Lampiran 2	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dan tujuan dari penyusunan Lapkin Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai laporan dari semua kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai target dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 – 2023, baik kegiatan administrasi yang bersifat rutinitas maupun kegiatan pembangunan sektor komoditi pangan dan perikanan.

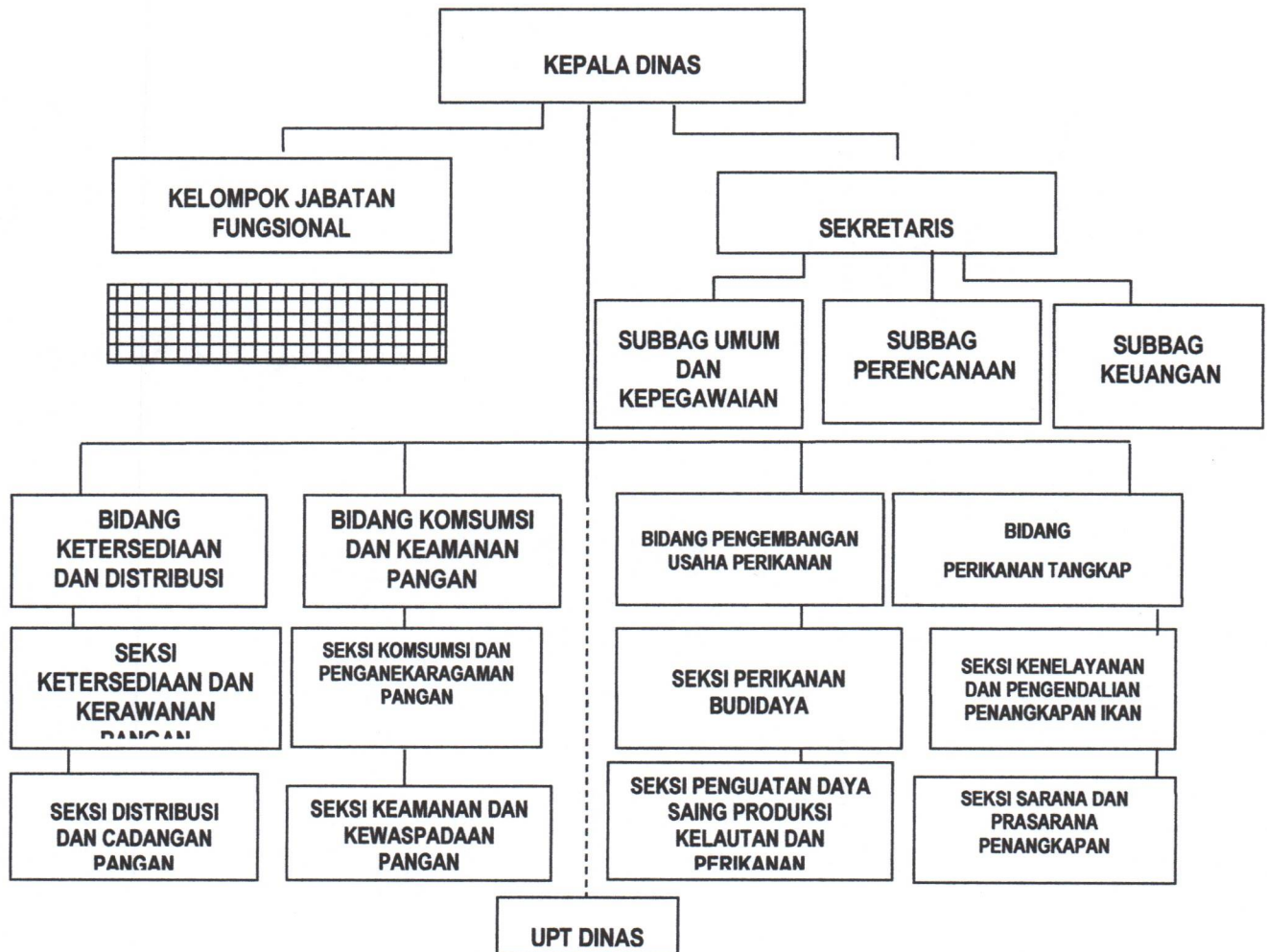
Untuk meningkatkan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, handal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan kinerja dibuat dalam rangka wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka upaya pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang terukur secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara bertahap dalam pencapaian visi dan misi selama lima tahun kedepan.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dengan dikeluarkannya Perda No. 26 tahun 2018 tanggal 17 April 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka bagan struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



Adapaun Uraian Tugas Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Uraian Tugas :

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

5. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
6. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI);
7. pemberdayaa usaha kecil pembudidayaan ikan;
8. pengelolaan pembudidayaan ikan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
10. pelaksanaan administrasi dinas;
11. pembinaan UPT Dinas; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dari:

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kepegawaian

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- 1. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi dari:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi dari:

1. **Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

2. Seksi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan

Seksi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan kewaspadaan pangan.

5. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

1. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Usaha Perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan usaha perikanan;
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan usaha perikanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha perikanan;
- e. pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan membawahi dari:

1. Seksi Perikanan Budidaya

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya.

2. **Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**
Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

6. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penguatan Perikanan Tangkap membawahi dari:

1. **Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan**

Seksi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan.

2. **Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan**

Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana penangkapan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan melaksanakan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh 28 personil dengan latar belakang beragam tingkat pendidikan.

Dalam menajalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan Kabupaten Tanah Laut hingga Desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan formal

No	PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1.	S2	2	0	2	7,10%
2.	S1	17	0	17	60.70%
3.	D-3	1	0	1	3,60%
4.	SLTA	8	0	8	28,60%
5.	SLTP	0	0	0	0%
6.	SD	0	0	0	0%
Jumlah		28	0	28	100%

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar bidang dengan tingkat pendidikan setingkat, pendidikan terdiri dari : SLTA sebesar 28,60%, D-3 sebesar 3,60%, S-1 sebesar 60,70%, S-2 sebesar 7,10%

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan

NO	GOLONGAN	STATUS		JUMLAH	%
		PNS	CPNS		
1	2	3	4	5	6
1	GOL I	0	0	0	0%
2	GOL II	5	0	5	14.30%
3	GOL III	17	0	17	60.70%
4	GOL IV	7	0	7	25%

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Tabel. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Jabatan/Eselonoring

No.	Eselon	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	11
4.	Non Eselon	11

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

C. Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

Permasalahan terkait dengan Ketahanan Pangan Belum optimalnya

- 1) Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan ,
- 2) Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- 3) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- 4) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya
- 5) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan
- 6) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Permasalahan terkait Perikanan

a. Pengembangan Usaha Perikanan

- 1) Belum sepenuhnya petani pembudidaya menguasai dan menerapkan cara berbudidaya ikan yang baik (CBIB)
- 2) Rendahnya kualitas/ mutu benih ikan

- 3) Menurunnya daya dukung lahan tambak
- 4) Saluran tambak mengalami pendangkalan
- 5) Adanya pencemaran air tambak
- 6) Hilangnya tambak akibat abrasi dan rob
- 7) Kurangnya sarana dan prasarana budidaya perikanan
- 8) Tingginya harga pakan ikan tidak sebanding dengan kenaikan nilai produksi
- 9) Kapasitas SDM pembudidaya belum optimal
- 10) Kurangnya akses permodalan
- 11) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengolah dan pemasaran dalam hal inovasi produk
- 12) Produk olahan perikanan di masyarakat masih rendah
- 13) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
- 14) Masih banyak pengolah hasil perikanan yang kurang higienis dan masih menggunakan bahan-bahan ADITIF (pengenyal, pengawet, pewarna)
- 15) Kurangnya akses pemasaran dan promosi produk hasil perikanan
- 16) Kurangnya sarana prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
- 17) Kurangnya permodalan dan Kurangnya kesadaran para pelaku usaha/ pengolah untuk memproses perijinan usaha pengolahan

b. Permasalahan terkait Perikanan Tangkap

- 1) Kurang optimalnya fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 2) Sedimentasi di alur pelayaran (pendangkalan muara sungai sehingga kapal kesulitan masuk TPI)
- 3) Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
- 4) Pemanfaatan dan penangkapan ikan di perairan umum belum optimal
- 5) Lemahnya pengawasan dan pengendalian aktifitas penangkapan ikan
- 6) Nelayan tidak mempunyai penghasilan lain di musim paceklik
- 7) Kurangnya sarana prasarana penangkapan.
- 8) Kurangnya informasi, pengetahuan, keterampilan dan pemanfaatan teknologi oleh Nelayan
- 9) Kurangnya akses permodalan

D. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

- a. Pemberian Rekomendasi Pembuatan Izin Kapal Perikanan dan Pengiriman Hasil Olahan
- b. Pemungutan Sewa Beli dan Sewa Pakai Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan
- c. Menyiapkan Persediaan Gabah untuk Penanggulangan Bencana
- d. Penyedia alat tangkap ramah lingkungan
- e. Penyedia bibit ikan dan pakan ikan sesuai standar
- f. Survei harga pangan di pasar
- g. Stabilitas harga pangan masyarakat

E. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Renstra
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala DKPP)
3. Eselon III Sekretaris
 - 3.1 Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 3.2 Eselon IV Kasubag Perencanaan
 - 3.3 Eselon IV Kasubag Keuangan
4. Eselon III Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 4.1 Eselon IV Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - 4.2 Eselon IV Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan
5. Eselon III Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - 5.1 Eselon IV Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 5.2 Eselon IV Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan
6. Eselon III Kabid Perikanan Tangkap
 - 6.1 Eselon IV Kasi Sarana dan Prasarana Penangkapan
 - 6.2 Eselon IV Kasi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan
7. Eselon III Kabid Pengembangan Usaha Perikanan
 - 7.1 Eselon IV Kasi Perikanan Budidaya
 - 7.2 Eselon IV Kasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP

- a. Simpulan
- b. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Capaian Kinerja Renstra (2018-2023)
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”**

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor Ketahanan Pangan dan perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanah Laut, visi sektor Ketahanan Pangan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ada pada Misi Ketiga dan kelima yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara lebih detail, keterkaitan Misi Ketiga dan Kelima dengan Tujuan dan Sasarannya adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah in

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Selain Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan diatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai tujuan yang ingin diraih/ diwujudkan.

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Berkelanjutan
2. Meningkatnya produksi perikanan
3. Terwujudnya peningkatan tatakelola administrasi perkantoran

Indikator Tujuan Sebagai Berikut :

1. Persentase Ketersediaan pangan Masyarakat
2. Persentase produksi perikanan
3. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran

b. Sasaran

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
5. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
7. Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan Dan Pelaporan

8. Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Indikator Sasaran sebagai berikut

1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat
2. Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan Perairan Umum
4. Persentase produksi perikanan budidaya air tawar
5. Persentase produksi perikanan budidaya air payau
6. Persentase produksi olahan hasil perikanan
7. Nilai saki dinas ketahanan pangan dan perikanan
8. persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan
9. persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian

Tabel (Tujuan,Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	Persentase ketersediaan pangan Masyarakat	114 % Surplus 43.419 Ton	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	114 % Surplus 43.419 Ton	114 % Surplus 43.419 Ton	114 % Surplus 43.419 Ton	114 % Surplus 43.419 Ton	114 % Surplus 43.419 Ton
				Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase produksi perikanan Tangkap	2,5%	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan perairan umum	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

		Persentase produksi perikanan Budidaya	2,5%	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya air tawar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
					Persentase produksi perikanan budidaya air payau	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
				Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase produksi olahan hasil perikanan	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
3.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Persentase tata kelola administrasi perkantoran	100%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	kenaikan nilai saki dinas ketahanan pangan dan perikanan	B	B	B	B	B
				Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Perencanaan Dan Pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum Dan Kepegawaian	persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

D. Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Perikanan tangkap dan budidaya
			$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - 1} \times 100$	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan :

No	Eselon	sasaran strategis sesuai renstra	Uraian Indikator	Target
1	II	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	114 % Sulprus
	II	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2.5%
2	III	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	1%
	III	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	90 %
	III	meningkatkan produksi perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut	2.5%
			Persentase produksi perikanan tangkap perairan umum	2.5%
	III	meningkatkan produksi perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya air tawar	2.5%
			Persentase produksi perikanan budidaya air payau	2.5%
	III	meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	Persentase produksi olahan hasil perikanan	2.5 %
	III	meningkatkan kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Nilai saki SKPD	75
	III	meningkatkan kelancaran operasional	persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100%

		administrasi umum dan kepegawaian		
	III	meningkatnya kelacaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100%
3	IV	Telaksananya Distribusi dan Penyediaan Cadangan Pangan di Masyarakat	Jumlah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	7500 Kg
			Jumlah Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah	1 Gudang
	IV	Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	4 Unit
			Jumlah Doumen penyusunan data kerawanan pangan/SKPG	2 Dok
	IV	Melaksanakan Keamanan Pangan dan Komsumsi Pangan Lokal	Jumlah sarana pengawasan keamanan pangan segar	5 Jenis
	IV	Meningkatnya Pola Pangan Harapan	Nilai skor pola pangan harapan (PPH)	90%
	IV	Melaksanakan Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah dokumen data Sumberdaya perikanan tangkap	1 Dok
		Melaksanakan Fasilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap	Jumlah sistem informasi sumberdaya perikanan tangkap berbasis web	1 Sistem
	IV	Melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Jumlah pemberdayaan nelayan kecil	3 Kali

	IV	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Perikanan	Jumlah pengawasan sumber daya perikanan	6 Kali
	IV	Melaksanakan peningkatan produksi perikanan budidaya	Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan	15 Orang
			Jumlah penerbitan TDPIK	25 Berkas
			Jumlah prasarana pembudidaya ikan lele	2 Pokdak an
			Jumlah prasarana pembudidaya ikan patin	2 Pokdak an
	IV	Pembinaan/peningkatan mutu diverifikasi produk kelautan dan perikanan	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	5 Kali
	IV	Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Jumlah Identifikasi Unit Pengolahan Ikan Untuk Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	4 Unit
	IV	menyusun data kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dilayani secara tertib	100%
	IV	Mengadakan saran dan prasarana Kantor	Jumlah dokumen sekretariat yang terkait sarana dan prasarana	100%
	IV	menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja dinas ketahanan pangan dan perikanan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 Dok
			Jumlah laporan SKPD	3 Laporan

	IV	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan pemerintah daerah	1 Dok
--	----	--	---	-------

F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Cpaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
- c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- a. Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
- b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- 8. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
 - a. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota

- 9. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
 - a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun, pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2018-2023, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan harmoni.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia. Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2000 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 52 gram/kap/hari.

Adapun data hasil konsumsi aktual berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH actual penduduk Kabupaten Tanah Laut masih sebesar 84,1 %, belum mencapai nilai standar Minimal yaitu 90 %. Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target yang ingin dicapai.

1.1 Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 disusun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra OPD periode 2018 - 2023;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2018 - 2023;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 - 2023;
6. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 - 2023;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018 - 2023;
8. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
9. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah laut;

11. Menjadi pedoman DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.2 Visi RPJMD

Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

**“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”**

1.3 Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor Ketahanan Pangan dan perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanah Laut, visi sektor Ketahanan Pangan dan perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi

pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Tanah Laut dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Untuk tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ada pada MISI Ketiga dan kelima yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Eselon II

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permen/PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, fungsi organisasi tersebut.

Adapun untuk memulai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada.

Capaian indikator kinerja utama diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi sejauhmana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama mencerminkan outcome dari program –program utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan memberikan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan perkembangan dinamika masyarakat, Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan 2 indikator kinerja dan 10 sasaran strategis.

Indikator kinerja utama sesuai peraturan Permanpan dan Reformasi Birokrasi merupakan acuan atau kerangka kerja Pemerintah Daerah Khususnya dalam pencapaian target kinerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2021, yang benar-benar terukur yang harus dilaksanakan oleh SKPD sesuai Renstra untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Perikanan tangkap dan budidaya
			$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - 1} \times 100$	

Target dan Capaian IKU

No	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ton	43.419 Ton 114 % Surplus	133.196	206,77	Penurunan persentase surplus ketersediaan pangan dari tahun 2020

						(berdasarkan ASEM)
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	56.708	64.545,1	13,82	Perikanan Tangkap
		Ton	1162	1384,39	19,14	Perikanan Budidaya

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin Ketersediaan Pangan dan Konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat Rumah Tangga, Daerah, Nasional untuk sepanjang waktu dan merata. Berdasarkan data Produksi pangan s.d tahun 2021 bahwa Tanah Laut berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Dengan Jumlah penduduk 351.561 jiwa dengan kebutuhan pangan 43.419 ton/tahun sudah termasuk peningkatan kebutuhan pangan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Kondisi kebutuhan pangan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sangat tercukupi dengan nilai ketersediaan pangan yang cukup yaitu sebesar 133.196 ton bahkan surplus yang menjadi Cadangan Pangan Daerah sebesar 97.937 ton yang memang mengalami penurunan nilai persentase surplus sebesar 39,7 % dari Tahun 2020.

Pada iku kedua, peningkatan produksi perikan yang mada ada dua bidang yang memangu indikator tersebut yaitu bidang perikanan tangap dan bidang pengembangan usaha perikanan, dalam target produksi perikanan tersebut sebesar 57870 ton terealisasi produksi pada tahun 2021 sebesar 65929,49 ton (13,93%).

3. Eselon III (Sekretaris)

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota SKPD dengan beberapa kegiatan anata lain ;

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.695.905.664,00	92,19%	4.811.006.621,00	65,04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.158.636,00	94,29%	43.666.076,00	54,58%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.162.456,00	100,00%	29.373.876,00	66,51%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000,00	100,00%	1.360.000,00	64,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000,00	100,00%	250.000,00	35,71%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.640.000,00	100,00%	1.940.000,00	73,48%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.534.900,00	100,00%	1.400.000,00	91,21%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.006.280,00	100,00%	4.392.200,00	31,36%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.990.000,00	60,00%	4.950.000,00	19,81%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.960.928.882,00	66,67%	4.457.243.768,00	57,17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.909.304.060,00	100,00%	4.407.197.816,00	74,58%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.624.822,00	100,00%	50.045.952,00	96,94%
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.106.530,00	100,00%	87.696.025,00	73,62%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.932.080,00	100,00%	3.265.350,00	55,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.480.390,00	100,00%	72.600.781,00	91,34%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.984.560,00	100,00%	11.829.894,00	78,95%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	100,00%	1.200.000,00	66,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.909.500,00	100,00%	182.516.771,00	76,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.347.616,00	100,00%	165.166.618,00	80,74%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.457.200,00	100,00%	24.054.116,00	44,17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.770.416,00	100,00%	139.992.502,00	98,05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.364.000,00	100,00%	57.234.134,00	59,06%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.500.000,00	100,00%	29.111.000,00	42,50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	100,00%	4.258.000,00	38,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.864.000,00	100,00%	23.865.134,00	95,98%

Dari tabel diatas anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. **6.695.905.664,-** dengan realisasi

sebesar Rp. 4.811.006.621,- dengan persentase keuangan sebesar 65,04 % dengan realisasi fisik 92,19 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap Indikator sasaran, yaitu kenaikan nilai sakiD dinas ketahanan pangan dan perikanan.

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Nilai sakiD SKPD.	75	

Untuk indikator nilai SAKIP SKPD yang ditargetkan tahun 2021 dengan nilai 75, agar memperoleh target tersebut, maka harus memenuhi kriteria-kriteria dalam penilaian baik dari bagian organisasi maupun hasil penilaian reuiv infektorat kabupaten. Dalam perbandingan pada tahun 2020 target Nilai sakiD SKPD adalah B dan terealisasi dengan nilai B (69,5).

Di tahun 2021 ini target B tersebut bisa tercapai nilai sakiD minimal BB atau dengan target angka tahun 2021 nilai 75.

b. Meningkatkan Kelacaran Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100%	100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan. Kegiatan tersebut tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1). Perencanaan dari penyusunan renja Awal, penyusunan Pra RKA, Penyusunan Renja Akhir, Penyusunan RKA sampai menjadi DPA SKPD.
- 2) Pengelolaan laporan-laporan dari pembuatan laporan RB, Manajemen Resiko, LAKIP, LKPJ dan menjadi Laporan SAKIP

c. Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawain

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawain	persentase keterkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawain	100 %	

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi
- 2) Tata kelola administrasi kepegawain yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja para auditor dan pejabat eselon IV dan Inspektur, laptop, komputer PC, lemari arsip, dan printer.
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor. Kegiatan yang mendukung fasilitas Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawalan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.

3.1 Eselon IV (Kassubag Perencanaan)

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan beberapa Sub Kegiatan, anggaran sebesar Rp. 90.158.636,- dengan laporan kinerja (LAPKIN) Tahun 2021 35

realisasi sebesar Rp. 43.666.076,- dengan persentase keuangan sebesar 54,58 % dengan realisasi fisik 94,29 %.

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Rp	%
			Keuangan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.158.636,00	94,29%	43.666.076,00	54,58%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.162.456,00	100,00%	29.373.876,00	66,51%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000,00	100,00%	1.360.000,00	64,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000,00	100,00%	250.000,00	35,71%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.640.000,00	100,00%	1.940.000,00	73,48%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.534.900,00	100,00%	1.400.000,00	91,21%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.006.280,00	100,00%	4.392.200,00	31,36%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.990.000,00	60,00%	4.950.000,00	19,81%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran, yaitu kenaikan nilai sakip dinas ketahanan pangan dan perikanan.

Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan dan pelaporan.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan dan pelaksanaan dan pelaporan.	100 %	100 %

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaporan. Kegiatan tersebut tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1). Perencanaan dari penyusunan renja Awal, penyusunan Pra RKA, Penyusunan Renja Akhir, Penyusunan RKA sampai menjadi DPA SKPD.

- 2) Pengelolaan laporan-laporan dari pembuatan laporan LAKIP, LKPJ dan menjadi Laporan SAKIP.

3.2 Eselon IV (Kassubag Umum Kegawayaan)

Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kegawayaan Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Keluaran	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %		71,14%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.106.530,00	100,00%	87.696.025,00	73,62%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.932.080,00	100,00%	3.265.350,00	55,05%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.480.390,00	100,00%	72.600.781,00	91,34%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14.984.560,00	100,00%	11.829.894,00	78,95%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	100,00%	1.200.000,00	66,67%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.909.500,00	100,00%	182.516.771,00	76,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.347.616,00	100,00%	165.166.618,00	80,74%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.120.000,00	100,00%	1.120.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.457.200,00	100,00%	24.054.116,00	44,17%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.770.416,00	100,00%	139.992.502,00	98,05%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.364.000,00	100,00%	57.234.134,00	59,06%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	68.500.000,00	100,00%	29.111.000,00	42,50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	100,00%	4.258.000,00	38,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.864.000,00	100,00%	23.865.134,00	95,98%

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran, Persentase terkelolanya administrasi kegiatan umum dan kepegawaian.

Uraian selengkapanya per indikator tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
menyusun data kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dilayani secara tertib	100%	100	100

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1). Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepegawaian (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawas dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pemaratan absen baik absen masuk dan pulang kantor serta mentaati apel baik apel gabungan hari Senin dan gabungan hari tertentu juga apel setiap hari di kantor.

Mengadaan sarana dan prasarana kantor

Uraian selengkapanya per indikator tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Mengadakan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah dokumen sekretariat yang terkait sarana dan prasarana	1 Dok	1 Dok	100

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi
2. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja untuk para auditor dan pejabat eselon IV dan Inspektur, laptop, komputer PC, lemari arsip, dan printer.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor.

Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawalan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.3 Eselon IV (Kassubag Keuangan)

Meningkatkan kelancaran operasional administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan 2 Sub Kegiatan antara Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100		57,17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.960.928.882,00	100	4.457.243.768,00	85,76
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.909.304.060,00	100	4.407.197.816,00	74,58
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.624.822,00	100	50.045.952,00	96,94

Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin Ketersediaan Pangan dan Konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat Rumah Tangga, Daerah, Nasional untuk sepanjang waktu dan merata. Berdasarkan data Produksi pangan s.d tahun 2021 bahwa Tanah Laut berada pada posisi surplus pangan (beras) dengan target 114%. Dengan jumlah penduduk 351.561 jiwa dengan kebutuhan pangan 43.419 ton/tahun sudah termasuk peningkatan kebutuhan pangan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional. Kondisi kebutuhan pangan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sangat tercukupi dengan nilai ketersediaan pangan yang cukup yaitu sebesar 133.196 ton bahkan surplus yang menjadi Cadangan Pangan Daerah sebesar 97.937 ton yang memang mengalami penurunan nilai persentase surplus sebesar 39,7 % dari Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena bencana banjir besar pada beberapa Kecamatan Sentra Produksi diantaranya Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kurau dimulai Akhir Desember 2020 s.d bulan Februari 2021, sedangkan nilai ketersediaan masih tercukupi untuk Kabupaten Tanah Laut. Dimana Cadangan Pangan tersimpan dan terdistribusi di masyarakat dalam bentuk Stock/ Distribusi Pasar lokal, Gudang Penggilingan Padi Masyarakat, 38 Lumbung Pangan Masyarakat dan 1 Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

4. Eselon III (Kabid Ketersediaan dan distribusi Pangan)

Terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan target 1 dokumen yang berarti realisasi telah mencapai target 100%. Dokumen laporan keuangan merupakan dokumen wajib SKPD yang harus dibuat dan dilaporkan setiap bulannya terkait pengeluaran dan penerimaan keuangan dinas

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan daerah	1 Dok	1 Dok	100

DATA SASARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KET
Meningkatnya Ketersediaan Pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan pangan masyarakat	Ton	43.419 Ton (114%)	133.196	206,77	Penurunan persentase surplus ketersediaan pangan dari tahun 2020 (berdasarkan ASEM)

4.1 Eselon IV (Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)**Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan / kerawanan pangan yang bersifat sementara ataupun keadaan darurat.

Saat ini Kabupaten Tanah Laut memiliki 1 (satu) buah Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah Pemerintah (CPPD) yang berada di Kecamatan Pelaihari yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan pangan pemerintah yang merupakan sumber penyediaan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan / kerawanan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat.

No.	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Stock Awal (kg)
					Gabah
1	Tani Makmur	Telaga	Pelaihari	Tanah Laut	12000
2	Mekar Sari I	Tajau Pecah	Batu Ampar	Tanah Laut	0
3	Sari Mulia	Ujung	Bati – Bati	Tanah Laut	6000
4	Lestari Makmur	Sumber Makmur	Takisung	Tanah Laut	0
5	Rezeky Tanjung	Tanjung Dewa	Panyipatan	Tanah Laut	0
6	Unggul II	Karang Rejo	Jorong	Tanah Laut	0
7	Mufakat	Panjaratan	Pelaihari	Tanah Laut	1000
8	Sarantang Saruntung	Kuringkit	Panyipatan	Tanah Laut	8000

9	Karya Mulya	Kayu Abang	Tambang Ulang	Tanah Laut	0
10	Maju Bersama	Handil Birayang Bawah	Bumi Makmur	Tanah Laut	7600
11	Kayuh Baimbai	Handil Babirik	Bumi Makmur	Tanah Laut	1500
12	Tungkaran Bersatu	Tungkaran	Pelaihari	Tanah Laut	2000
13	Berkat Hemat	Raden	Kurau	Tanah Laut	1000
14	Rakat Mufakat	Handil Gayam	Bumi Makmur	Tanah Laut	5000
15	Harapan Baru	Guntung esar	Pelaihari	Tanah Laut	0
16	Maju Bersama	Handil Suruk	Bumi Makmur	Tanah Laut	12000
17	Beruntung Tani*	Handil Maluka	Bumi Makmur	Tanah Laut	4200
18	Makmur	Bumi Harapan	Bumi Makmur	Tanah Laut	6800
19	Al-Hidayah*	Handil Birayang Atas	Bumi Makmur	Tanah Laut	3000
20	Bunga Mekar	Sarikandi	Kurau	Tanah Laut	8000
21	Sekawan	Sungai Bakar	Bajuin	Tanah Laut	1500
22	Sumber Makmur	Bajuin	Bajuin	Tanah Laut	0
23	Gapura	Maluka Baulin	Kurau	Tanah Laut	8500
24	Alung	Tambak Karya	Kurau	Tanah Laut	0
25	Sidodadi	Benua Tengah	Takisung	Tanah Laut	8400
26	Lestari	Lokserapang	Pelaihari	Tanah Laut	8000
27	Berkat Permai	Angsau	Pelaihari	Tanah Laut	2500
28	Mitra Usaha	Pulau Sari	Tambang Ulang	Tanah Laut	12000
29	Usaha Mandiri	Batalang	Jorong	Tanah Laut	12100
30	Suka Maju	Tabanio	Takisung	Tanah Laut	12000
31	Jaka Suma	Telaga	Pelaihari	Tanah Laut	8000
32	Tunas Muda	Ambungan	Pelaihari	Tanah Laut	100
33	Serumpun	Gunung Raja	Tambang Ulang	Tanah Laut	4000
34	Mekar sari	Handil Labuan Amas	Bumi Makmur	Tanah Laut	2000
35	Suka Maju	Ketapang	Bajuin	Tanah Laut	4000
36	Berkat Rakat Mufakat	Padang	Bati-Bati	Tanah Laut	0
37	Laras Banua	Banua Raya	Bati-Bati	Tanah Laut	0
38	Gapoktan Sido Makmur	Damit	Batu Ampar	Tanah Laut	0
		Jumlah			161200

Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2021 memiliki 38 buah Lumbung Pangan Masyarakat dengan rincian 9 buah lumbung yang pembangunannya menggunakan dana APBD I dan 29 lumbung pembangunannya menggunakan dana DAK dan pembangunan lumbung terakhir yaitu TA 2021 sebanyak 3 (empat) buah dengan rincian 2 (dua) buah dana APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 1 (satu) buah dana DAK

Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Program kegiatan ini bersifat lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait. Wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, propinsi, dan kabupaten di

pedesaan. Program Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah Food Security & Vulnerability Atlas (FSVA) dan desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30 % dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan pemecahan masalah serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian langsung.

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat.
- b. Penguatan kelembagaan.

Pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor

Berikut daftar kelompok afinitas yang berada di 26 Desa di Kabupaten Tanah Laut :

No	Nama Desa	Tahun Kegiatan	Status Desa	No	Nama kel.Afinitas	Jumlah Bantuan Dana
1.	Bingkulu	2006	Desa Reguler	1. 2. 3.	- Mandiri Pangan - Maju berseri - Sumber rezeki	Rp. 80 jt
2.	Martadah baru	2018	Desa Replikasi	4.	Griya berkarya	Rp. 50 jt
3.	Sungai Pinang	2021	Desa Replikasi	5.	Maju Baimbay	-
4.	Ujung	2006	Desa inti	6. 7. 8.	Sumber Rezeki Ruhuy Rahayu Sido Muncul	Rp. 100 jt
5.	Benua Raya	2010	Desa Replikasi	9.	Mapan Benua Raya	Rp. 25 Jt + 50 Jt

6.	Bati-bati	2010	Desa Replikasi	10.	Giat Lestari	Rp. 25 Jt + 50 Jt
7.	Ujung Baru	2010	Desa Replikasi	11.	Al barokah	Rp. 25 Jt + 50 Jt
8.	Liang Anggang	2015	Desa Replikasi	12.	Sumber Rezeki	Rp. 50 jt
9.	Padang	2018	Desa Replikasi	13.	Rakat mufakat	Rp. 50 jt
10	Panjaratan	2007	Desa inti	14.	Cinta Damai	Rp. 100 jt
.				15.	Maju bersama	
.				16.	Bina Bersama	
11.	Tungkaran	2008	Desa inti	17.	Tungaran Maju I	Rp. 100 jt
				18.	Tungaran Maju II	
				19.	Tungkaran Maju III	
				20.	Tungkaran Maju IV	
12	Telaga	2011	Desa Replikasi	21.	Usaha Mandiri	Rp. 25 Jt
13.	Guntung Besar	2011	Desa Replikasi	22.	Harapan Baru	Rp. 25 Jt
14.	Bumijaya	2011	Desa Replikasi	23.	Berkat Usaha	Rp. 25 Jt
15.	Panggung baru	2013	Desa Replikasi	24.	Mapan panggung baru	Rp. 25 Jt
16.	Ujung batu	2013	Desa Replikasi	25.	Mapan ujung batu	Rp. 25 Jt
17.	Handil Gayam	2008	Desa Inti	26.	Suka makmur	Rp. 100 jt
				27.	Rakat Swarga	
				28.	Doa Bersama	
18.	Pantai harapan	2018	Desa Replikasi	29.	Bunga rambai	Rp. 50 jt
19.	Tanjung Dewa	2009	Desa Inti	30.	Maju Bersama	Rp. 100 jt
				31.	Cinta Damai	
20.	Kandangan Lama	2018	Desa Replikasi	32.	Dadap tuha	Rp. 50 jt
21.	Batu Tungku	2018	Desa Replikasi	33.	Karya mandiri	Rp. 50 jt
22.	Batakan	2018	Desa Replikasi	34.	Harapan maju	Rp. 50 jt
23.	Kuringkit	2021	Desa Replikasi	35.	Mawar	-
24.	Kali Besar	2010	-	36.	Karya Bersama	Rp. 100 jt
				37.	Harapan Kita	
25.	Muara Kintap	2012	Desa inti	38.	Ujung Timur	Rp. 100 jt
				39.	Berkat bersama	
26.	Tebing Siring	2021	Desa Replikasi	40.	Berkah barokah	-

Dalam Tahun Anggaran 2021 ini telah dianggarkan kegiatan Pelatihan Keterampilan untuk Kelompok Afinitas di 8 (delapan) Desa yakni 5 (lima) Kelompok Afinitas yang ada di Kecamatan Bati-bati, 1 (satu) Kelompok Afinitas di Kecamatan Tambang Ulang, 1 (satu) Kelompok Afinitas di Kecamatan Bumi makmur dan 1 (satu) Kelompok Afinitas di Kecamatan Panyipatan. Adapun Kegiatan Pelatihan Keterampilan yang dilaksanakan merupakan usulan dari masing-masing kelompok pada tahun 2019 yang lalu namun baru dapat direalisasikan pada tahun 2021 ini karena terbatasnya anggaran akibat refofusing, dan materi pelatihan diusulkan berdasarkan potensi yang ada di masing-masing desa kelompok afinitas. Adapun rangkaian pelatihan keterampilan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Afinitas / Desa / Kecamatan	Materi Pelatihan Keterampilan
1.	Mapan Benua raya Desa Benua Raya dan Sumber Rezeki Desa Liang Anggang / Bati-bati	Minuman Kekinian Milk Tea Boba labu Kuning
2.	Griya Berkarya /Martadah Baru / Tambang Ulang	Budidaya Jamur Tiram
3.	Bunga rambai / Pantai Harapan / Bumi Makmur	Sirup Buah Rambai, Selai buah rambai dan Rambai batutuk
4.	Sumber Rezeki -Liang Anggang dan Giat Lestari Desa Bati-bati / Bati-bati	Pembuatan Pupuk Organik
5.	Rakat Mufakat / Padang / bati-bati	Pembuatan Pakan/Pelet Ternak Secara Sederhana
6.	Tunas Mandiri / batu Tungku / Panyipatan	Pembuatan Pupuk Organik

Tabel. Daftar Materi Pelatihan Keterampilan Bagi Kelompok Afinitas Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Kab. Tanah laut Tahun 2021



Dokumentasi Pelatihan Keterampilan Budidaya Jamur Tiram Kelompok Afinitas Griya Berkarya Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang Tanggal 22 Nopember 2021



Dokumentasi Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Buah Mangrove (Pidada/Rambai) Kelompok Afinitas Bunga Rambai Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 23 Nopember 2021



Pembuatan Minuman Kekinian Milk Tea Boba Labu Kuning untuk Kelompok Afinitas Benua Raya dan Kelompok Afinitas Sumber Rezeki Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati Tanggal 19 Nopember 2021



Dokumentasi Pelatihan Keterampilan Pembuatan Pupuk Organik untuk Kelompok Afinitas Sumber Rezeki Desa Liang Anggang dan Afinitas Giat lestari Desa bati-bati Kec. Bati-Bati Tanggal 24 Nopember 2021

Dengan dilaksanakannya pelatihan Keterampilan bagi kelompok Afinitas ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam hal memanfaatkan potensi sumberdaya alam local yang ada di masing-masing desa penerima manfaat kegiatan Desa mandiri Pangan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memberikan tambahan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok afinitas.

a. Pembelajaran / Kaji tiru Kelompok Afinitas ke pertanian Hidrokanik Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2021 ini, dilaksanakan Pembelajaran / kaji tiru pertanian Sistem Hidrokanik yang rencananya akan diterapkan di Desa-desa yang minim lahan pertanian diakibatkan kondisi alam yang tidak memungkinkan karena tanah berbatu / berpasir ataupun air payau. Sehingga dengan diberikan perlakuan sebagaimana yang diterapkan dalam pertanian Hidrokanik.



Sistem Pertanian Hidrokanik yang diterapkan di P4S Bengkel Mimpi Desa Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang Provinsi Jawa Timur

Hidroganik berasal dari kata “Hidro” dan “Organik” yang didefinisikan sebagai sistem budidaya organik yang di tempatkan dalam suatu instalasi dengan sumber nutrisi utama pupuk organik dan air kolam sebagai tambahan nutrisi tanpa adanya penyaringan.



Kegiatan Pembelajaran/Kaji tiru Kelompok Afinitas di P4S Bengkel Mimpi

Kelebihan Budidaya secara Hidroganik adalah :

- ✚ 1 tahun bisa 5 - 6 kali panen
- ✚ Bertani dimana saja, (di atas gedung, sungai, danau)
- ✚ Kualitas sehat
- ✚ Kuantitas lebih tinggi 1 : 3 dibanding konvensional

Dengan diterapkannya system pertanian Hidroganik, diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil pertanian khususnya padi sebagai sumber pangan pokok masyarakat desa, sehingga tercipta ketahanan pangan di masyarakat dalam kondisi daerah yang rawan.

4.2 Eselon IV (Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan)

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi masalah pangan seperti kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu

implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Pengembangan cadangan pangan dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat dari kerawanan pangan dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang terdapat di kelompok, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

Sesuai dengan amanat Kepala Daerah, bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Pengadaan cadangan pangan pemerintah dilaksanakan melalui penunjukan langsung dimana cadangan pangan pemerintah disimpan di gudang cadangan pangan pemerintah yang terletak di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari yang selanjutnya akan disalurkan ke masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana baik bencana alam maupun bencana non alam dan/atau keadaan darurat; daerah rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana (bencana alam atau bencana non alam) maupun masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan; perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat; antisipasi gejolak harga beras pada saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); masyarakat yang mengalami masalah kesehatan seperti anak gizi buruk dan Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); dan individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang dapat diberikan bantuan sosial.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun ini adalah sebanyak 7.5 ton (7500 kg) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II.

Cadangan pangan pemerintah pada tahun ini disalurkan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam (banjir) sebesar 4370 kg dengan sisa stok opname 3130 kg. Diharapkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak bencana.



Dokumentasi Pengadaan Gabah Tahun 2021

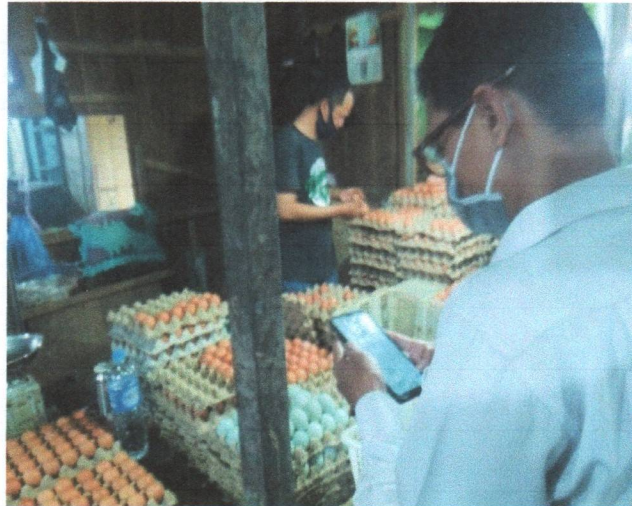
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan pemantauan, stok, pasokan dan harga pangan adalah melakukan pemantauan harga pangan eceran di pasar tradisional di Kabupaten dan untuk mengetahui informasi tentang faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang mempengaruhi distribusi dan harga pangan, seperti kondisi ketersediaan pasokan, permintaan, stok bahan pangan pokok strategis dan sebagainya.

Bahan pangan yang dipantau antara lain pangan pokok strategis, yaitu beras lokal, beras unggul, gula, jagung pipilan kering, daging ayam ras, daging ayam kampung, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe rawit (japlak), cabe merah besar, cabe merah keriting, telur ayam ras, minyak goreng curah, kacang tanah, ikan papuyu, ikan nila, ikan haruan, ikan patin, ikan bawal, ikan bandeng, ikan peda, ikan lele, ikan sapat dan udang.

Pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, konsumsi pangan cenderung meningkat, kondisi ini berpotensi untuk mendorong meningkatnya harga bahan pangan. Peningkatan harga pangan dipicu oleh perilaku dan harapan pelaku pasar untuk meningkatkan harga/pendapatannya, disamping hambatan dalam sistem distribusi dan pemasaran bahan pangan juga karena masalah transportasi seperti sarana jalan dan alat angkutan.

Pada saat menjelang Ramadhan Tahun 2021 harga cabai merah besar mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan stok cabai merah besar yang berkurang sedangkan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan (Natal) bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng. Hal yang mempengaruhi kenaikan harga minyak goreng adalah turunnya panen sawit, kenaikan permintaan CPO serta gangguan logistik karena pandemik.





Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Harga

5. Eselon III (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia. Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2000 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 52 gram/kap/hari.

Hasil dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut ini meliputi Data-data Baseline, Konsumsi Hasil Pangan Hasil Susenas, hasil Analisis

Pola Konsumsi, Kecukupan Gizi, skor PPH, Sasaran PPH, Proyeksi Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan wilayah berdasarkan pendekatan PPH sebagaimana terlampir

Berdasarkan Hasil Analisis Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan (Konsumsi Energi Dan Protein) dan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat dari hasil perhitungan skor PPH pada Tabel dibawah ini.

Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Susenas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,295	58,5	64.8	30.8	58.5	53.9
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	0.3	1.8	0.6
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	24.8	13.4	43.4
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	0.0	12.6	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	0.2	0.7	0.4
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	4.7	2.0	8.3
7	Gula	108	4.9	5.4	0.0	4.9	0.1
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	3.2	3.9	5.6
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	1.7	2.2	3.0
	Total	2,215	100.0	110.7	65.8	100.0	115.4

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi : 2000 Kkal/Kapita/Hari
 **) Angka Kecukupan Protein : 52 Gram/ Kapita/ Hari

Hasil Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 2.215 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2000 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka

Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukkan hasil sebesar 65,8 Gram perkapita per hari, dimana AKP juga telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 52 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tanah Laut meskipun telah melampaui standar normative dan sudah memenuhi standar.

Dilihat dari Komposisi Angka Kecukupan Gizi nya, konsumsi padi-padian idealnya 50%, namun konsumsi di Tanah Laut tahun 2021 adalah 64,8 %, angka ini masih terlalu tinggi dan harus diturunkan sebesar 14,8 %. Kampanye untuk mengurangi konsumsi beras harus terus digalakkan dan ditingkatkan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan menggandeng seluruh Stakeholder agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.

Adapun data hasil konsumsi aktual berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH actual penduduk Kabupaten Tanah laut masih sebesar 84,1 %, belum mencapai nilai standar Minimal yaitu 90 %. Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah
- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia

Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, begizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1.295	58.5	64.8	1000	900.0
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	120	108.0
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	240	216.0
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	200	180.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	60	54.0
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	100	90.0
7	Gula	108	4.9	5.4	100	90.0
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	120	108.0
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	60	54.0
	Total	2.215	100.0	110.7	2000	1,800.0

*Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2000 Kkal/Kapita/Hari
SPM : Standar Pelayanan Minimum*

Dari 9 (sembilan) kelompok pangan asupan energi yang paling tinggi disumbangkan oleh kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.295 Kkal per kapita per hari kemudian disusul dari pangan hewani sebesar 296 Kkal perkapita per hari kemudian minyak dan lemak sebesar 280 kkal perkapita per hari, gula sebesar 108 kkal/kap/hari, 4 jenis ini semuanya sudah melebihi standar/ nilai idealnya utk asupan perharinya. sayur dan buah, kacang-kacangan sedangkan umbi-umbian masih sedikit sekali dan yang paling kecil adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 16 Kkal perkapita per hari.

Bila dilihat dari pencapaian energi menurut kelompok pangan. Maka tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tingkat konsumsi energy yang lebih dari ideal beberapa kelompok pangan. Namun masih terdapat ada beberapa kelompok pangan yang lebih kecil nilainya dari batas ideal. Standar normative konsumsi padi-padian perkapita per hari adalah 1.000 Kkal sementara masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi jenis padi-

padian hingga 1.295 Kkal. Konsumsi padi-padian idealnya adalah 50% sedangkan di Tanah Laut sebesar 58,5 %. Sedangkan standar normative konsumsi pangan sejenis umbi-umbian per kapita per hari adalah 120 Kkal, sementara masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi pangan jenis ini baru mencapai 40 kkal per kapita per hari.

Pangan hewani mestinya dikonsumsi 240 Kkal per kapita per hari, sementara masyarakat Tanah Laut telah dapat mengkonsumsi pangan hewani sebanyak 296 Kkal. Minyak dan Lemak mestinya dikonsumsi 200 kkal per kapita perhari, masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi lemak hingga 280 Kkal. Buah/biji berminyak mesti dikonsumsi 60 Kkal perkapita per hari, namun masyarakat Tanah Laut hanya 16 Kkal per kapita per hari.

Kacang kacang mesti dikonsumsi 100 Kkal per kapita per hari, namun warga Tanah Laut hanya mengkonsumsi 44,7 Kkal. Demikian pun halnya Gula mesti dikonsumsi hingga 100 Kkal per kapita per hari. Namun dikonsumsi sebanyak 107,5 Kkal.

Sayur dan Buah-buahan mesti dikonsumsi 120 Kkal per kapita per hari faktanya yang dikonsumsi 87,0 Kkal perkapita per hari. Sedangkan bumbu-bumbuan dan minuman mesti dikonsumsi 60 Kkal perkapita per hari, sayangnya masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi bumbu-bumbuan dan minuman sebesar 49 Kkal Per kapita per hari.

Secara Keseluruhan Pola konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal dikarenakan :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
2. Masih rendahnya konsumsi pangan buah/biji berminyak, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
4. Diperlukan upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
5. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system).

Apabila konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan

buah dalam skor PPH konsumsi tinggi. Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- Meningkatkan penyuluhan dan kampanye mengurangi konsumsi beras yang dilaksanakan secara terus menerus dan masif di seluruh Kabupaten Tanah Laut serta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.
- Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif
- Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui sosialisasi di kelompok wanita tani (KWT) dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), PKK dan posyandu.
- Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan pekarangan dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri tidak harus pergi kepasar atau warung yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan dipegunungan jauh dari penduduk, serta akses transportasi yang sulit.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) dengan rentang skor 0 hingga 100, dengan asumsi semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi dan seimbang. Dari hasil perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) mutu konsumsi masyarakat Tanah Laut mendapat skor PPH sebesar 84,1. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan P3nduduk
Berdasarkan Data Susenas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram / Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	307.4	1,295	58.5	64.8	0.5	29.2	32.4	25.0	25.0

2	Umbi-umbian	33.7	40	1.8	2.0	0.5	0.9	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	160.8	296	13.4	14.8	2.0	26.7	29.6	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	31.1	280	12.6	14.0	0.5	6.3	7.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	2.8	16	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4
6	Kacang-kacangan	19.8	45	2.0	2.2	2.0	4.0	4.5	10.0	4.5
7	Gula	29.4	108	4.9	5.4	0.5	2.4	2.7	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	206.3	87	3.9	4.3	5.0	19.6	21.7	30.0	21.7
9	Lain-lain	98.4	49	2.2	2.4	-	-	-	-	-
Total			2,215	100	110.7		89.7	99.3	100.0	84.1

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi : 2000 Kkal/Kapita/Hari

Untuk padi-padian, minyak dan lemak, Gula sudah mencapai skor PPH maksimum sedangkan umbi-umbian, pangan hewani, buah / biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah masih dibawah skor maksimal, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas pola konsumsi masyarakat Tanah Laut belum dikatakan memenuhi standar beragam, bergizi dan berimbang.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat Tanah Laut selama 4 tahun terakhir berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya , hal ini dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2021.

**Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2021**

Tahun	Energi Justifikasi	Skor PPH Justifikasi
2018	2.058	86.6

2019	2.211	83.3
2020	2.130	82.8
2021	2.215	84.1

Dari tabel di atas dapat dilihat skor PPH tahun 2018 senilai 86.6 dan tahun 2019 skor PPH turun menjadi 83,3. Pada tahun 2020 skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 82,8. sedangkan tahun 2021 skor PPH naik lagi menjadi 84,1. Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Gizi, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 - 2024, indikator skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut mengalami penurunan, walaupun tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari tahun 2020, namun masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan antara lain jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan rumah tangga seperti kita ketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kasus covid-19 tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, faktor lainnya adalah pendidikan, dan pantangan makanan.

Adapun dukungan kegiatan antara lain

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan mutu konsumsi dan keamanan pangan	86.075.170,-	73,24	100
		Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	604.617.892,-	56,9	100

5.1 Eselon IV (Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan)

Dalam Program dan Kegiatan pada Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan adalah :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan berupa Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan

Perkapita / tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi, dimana dibagi dalam 3 sub kegiatan yaitu :

- 1). Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita per tahun.
- 2). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 3). Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi perkapita per tahun.

Alokasi dana yang disediakan dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN		PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	604.617.892,-	56,9	100

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut mendukung kegiatan peningkatan nilai PPH Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang menangani Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pola Pangan Harapan mengacu Renstra adalah :

No	Sasaran Strategis sesuai Renstra	Uraian Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pola Pangan Harapan	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1 kali	1 kali	100	Pemantauan untuk wilayah Kabupaten belum bisa dilaksanakan karena kondisi covid-19 (Pemantauan menggunakan data Susenas)
		Jumlah Kegiatan Festival Pangan Lokal B2SA Tk.Kabupaten dan terikuti	1kali	1kali	100	

		Jumlah Sosialisasi dan Promosi pangan lokal	22 kali	12 kali	54	lokasi Sosialisasi dan Promosi pangan lokal dapat dilihat ditabel di bawah
		Jumlah Percontohan pemanfaatan pekarangan di Kabupaten	6 KWT	6 KWT	100	Lokasi Percontohan pemanfaatan pekarangan dpt dilihat pada table di bawah
		Jumlah Lomba pemanfaatan pekarangan	2 kali	2 kali	100	Lomba Tk. Kabupaten dan Provinsi
		Jumlah Gebyar pangan lokal Tk. Kabupaten	1 kali	0 kali	0	Tidak dilaksanakan karena kondisi Covid-19
		Jumlah pemanfaatan dan monitoring pemanfaatan pekarangan (kegiatan kawasan pangan lestari)	12 kali	12 kali	100	Pemanfaatan dan monitoring pemanfaatan pekarangan dapat dilihat pada table di bawah
		Survey dan pembinaan Kelompok Produsen Lokal	12 kali	12 kali	100	Survey dan pembinaan Kelompok Produsen Lokal dirinci pada berikut ini

Dari table di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

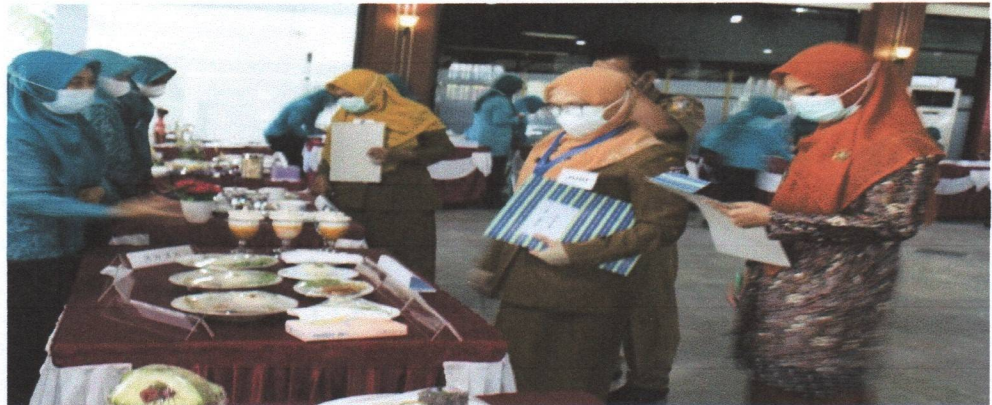
1. Kegiatan Pemantauan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan di desa dan kecamatan diwilayah kabupaten Tanah Laut, Hal ini karena kondisi covid-19 yang tinggi diwilayah yang akan dilakukan survey, sehingga diambil data Susenas untuk Skor PPH tahun 2021 di kabupaten Tanah Laut.



2. Kegiatan Festival Pangan Lokal B2SA Tingkat Kabupaten dilaksanakan 1 kali bertempat di Balai Rung Pelaihari. Sebagai Pemenang dalam

Lomba B2SA tingkat Kabupaten adalah PKK Kecamatan Jorong sebagai Pemenang Pertama.

Gambar Kegiatan Festival Pangan Lokal Tingkat Kabupaten.



Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Juga dilaksanakan di Balai Ruang Pelaihari, karena dalam masih dalam kondisi covid-19, maka dewan juri lomba dari Provinsi yang datang ke Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut meraih sebagai Juara Harapan ke-3 pada Lomba B2SA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar Kegiatan Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi.





3. Sosialisasi dan Promosi Pangan local dilaksanakan ditargetkan sebanyak 22 kali kegiatan dan hanya bisa dilaksanakan sebanyak 12 kali (54%). Hal ini dikarenakan kegiatan diawal tahun belum bisa dilaksanakan karena kasus covid-19 yang masih tinggi, sehingga kegiatan dilakukan pada triwulan ke-4 tahun 2021.
4. Percontohan pemanfaatan pekarangan di kabupaten sebanyak 6 KWT yaitu :

N o.	Kecamatan	Desa	Nama KWT	Jenis Bantuan	Jumlah Dana	Asal Dana
1.	Panyipatan	Kandangan Baru	An Nisa	Penumbuhan	60 juta	Dekon APBN Prov
2.	Tambang Ulang	Bingkulu	Khazanah Graha	Penumbuhan	60 juta	Dekon APBN Prov
3.	Pelaihari	Panggung Baru	Berkat Ibu	Penumbuhan	60 juta	Dekon APBN Prov
4.	Pelaihari	Tungkaran	Sejahtera	Penumbuhan	60 Juta	Dekon APBN Prov
5.	Kurau	Handil Negara	Mekar Sari	Penumbuhan	55 juta	DAK Non Fisik
6.	Kintap	Pandansari	Teratai Berseri	Penumbuhan	55 juta	DAK Non Fisik

5. Lomba Pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu lomba tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi. Pada Lomba Tingkat Kabupaten sebagai pemenang pertama adalah KWT Khazanah Graha. Pada lomba Tingkat Provinsi KWT Khazanah Graha terpilih sebagai juara pertama.

Gambar kegiatan lomba KWT th 2021.



6. Gebyar pangan lokal tidak dilaksanakan untuk tahun 2021, karena masih kondisi covid-19.
7. Pemantauan dan Monitoring Pemanfaatan Pekarangan (KRPL) dilaksanakan sebanyak 12 kali.
8. Survey dan Pembinaan Kelompok Produsen Pangan local telah dilaksanakan sebanyak 12 kali.

Berikut ini adalah kegiatan pemantauan dan monitoring pemanfaatan pekarangan (Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari) dan Kegiatan Survey pembinaan Kelompok Produsen Pangan Lokal telah dilaksanakan tahun 2021.

Data Desa Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, Monitoring Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Kelompok Produsen Pangan Lokal tahun 2021

No.	Nama Desa	Sosialisasi & Promosi Panga Lokal	Pemantauan & Monitoring KKRPL	Survey dan Pembinaan Kelompok Pangan Lokal
1.	Pandansari	1 kali	1 kali	1 kali
2.	Kintap	1 kali	1 kali	1 kali
3.	Bingkulu	1 kali	1 kali	1 kali
4.	Tungkaran	1 kali	1 kali	1 kali
5.	Kandangan Baru	1 kali	1 kali	1 kali
6.	Panggung Baru	1 kali	1 kali	1 kali
7.	Pulau Sari	1 kali	1 kali	1 kali
8.	Nusa Indah	1 kali	1 kali	1 kali
9.	Handil Gayam	1 kali	1 kali	1 kali
10.	Handil Negara	1 kali	1 kali	1 kali
11.	Handil Birayang	1 kali	1 kali	1 kali
12.	Damit Hulu	1 kali	1 kali	1 kali
	Jumlah	12 kali	12 Kali	12 Kali

5.2 Eselon IV (Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan)

Program dan kegiatan tersebut mendukung kegiatan peningkatan nilai PPH Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada program konsumsi dan keamanan pangan melalui kegiatan Peningkatan mutu konsumsi dan keamanan pangan berupa pembinaan dan sosialisasi baik di sekolah maupun pada lingkungan masyarakat serta pengawasan keamanan pangan, dalam indikator kinerja kasi tersebut melaksanakan keamanan dan pengawasan Pangan, baik di masyarakat dan langsung terhadap anak-anak di sekolah.

Ada 2 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 57.728.000,-
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Aasal Tumbuhan daerah Kabupaten/ Kota dengan dana sebesar Rp. 28.873.000,-

a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tanggal	Tempat	Sasaran	Hasil
1	22 Maret 2021	Desa Batakan Kec. Panyipatan	Poklhasar Pantai Indah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
2	24 Maret 2021	Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar	Petani cabai	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
3	29-Apr-21	Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati	KWT Multi Lestari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
4	25 Mei 2021	Desa Kait-Kait Baru Kec. Bati-Bati	KUB Bina Karya Bersama	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
5	27 Mei 2021	Desa Pandan Sari Kec. Kintap	KWT Teratai Berseri	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
6	2 Juni 2021	Desa Asri Mulya Kec. Jorong	KWT Tunas Mulya	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
7	3 Juni 2021	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	KWT Pandan Sari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
8	21 Juni 2021	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	Poklhasar Pesona Tanjung	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
9	1 Juli 2021	Desa Sungai rasau		

		Kec. Bumi Makmur	Poklhasar Sumber Rejeki	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
10	8 Juli 2021	Desa Bajuin Kec. Bajuin	Pelaku Usaha Bapak Jumangin (keripik pisang)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
11	14 Juli 2021	Kec. Tambang Ulang	Pelaku usaha ibu Nurul. K (dodol, bolu labu kuning dll)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
12	15 Juli 2021	Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	Pelaku usaha ibu Sumariyati (Bubuk cabai, keripik pisang dll)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
13	4 Agustus 2021	Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar	Pelaku Usaha Bambang Eko (Keripik tempe, pisang dll)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
14	16 Agustus 2021	Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang	KWT Khazanah Graha	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
15	02-Sep-21	Desa Kintap Kec. Kintap	KWT Siaga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
16	06-Sep-21	Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau	KWT Melati	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
17	09-Sep-21	Desa Asri Mulya	KWT Tunas Mulya	

		Kec. Jorong		Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
18	20-Sep-21	Desa Takisung Kec. Takisung	Poklahsar Omega Amplang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
19	15 oktober 2021	Kec. Jorong	PKK Kec. Jorong	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
20	21 oktober 2021	Desa Handil Negara Kec. Kurau	KWT Mekar Sari	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
21	22 oktober 2021	Desa Ketapang Kec. Bajuin	Ibu Rumah Tangga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
22	27 oktober 2021	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Pelaku usaha Bapak Rahmat (Kerpik singkong)	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
23	28 oktober 2021	Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	KWT Bina Keluarga	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
24	4 Nopember 2021	Desa Takisung Kec. Takisung	Poklahsar Batu Bejanggut	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
25		Desa Damit Hulu	KWT Air Mata Ibu	

	9 Nopember 2021	Kec. Batu Ampar		Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
26	11 Nopember 2021	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	Poklahsar Pulau Datu	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
27	16 Nopember 2021	Desa Galam Kec. Bajuin	PKK Desa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
28	18 Nopember 2021	Desa Banua Raya Kec. Bati-Bati	Poklahsar Dangsanak	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
29	22 Nopember 2021	Desa Tambak Karya Kec. Kurau	Poktan Sumber Rejeki	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
30	23 Nopember 2021	Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan	KWT Annisa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
31	29 Nopember 2021	Desa Handil Birayang Kec. Bumi makmur	Poktan Sumber Rejeki	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
32	7 Desember 2021	Kec. Kintap	PPL	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya
33	14 Desember 2021	Desa Gunung Melati Kec. Batu Ampar	PKK Desa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pangan yang aman dan bebas zat berbahaya

Tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pembinaan sebanyak 33 kali dengan sasaran adalah masyarakat (ibu Rumah tangga, KWT, PKK Desa) serta pelaku usaha.



b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

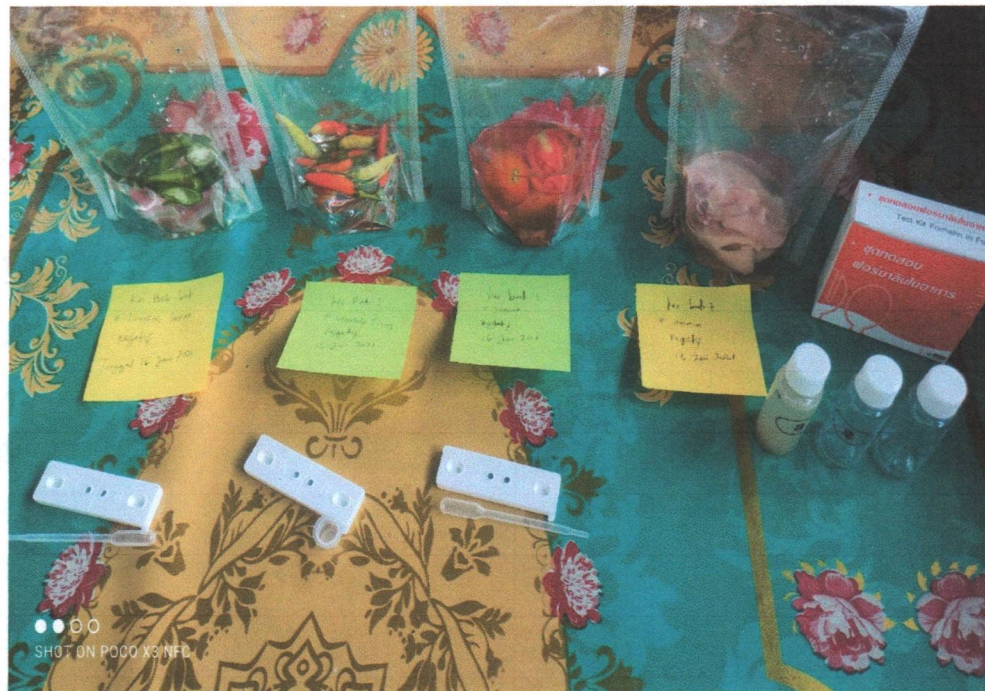
No.	Tanggal	Tempat	Sasaran	Hasil
1	11 Juni 2021	Kec. Bajuin	Pasar Bajuin	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
2	16 Juni 2021	Kec. Bati Bati	Pasar Bati Bati	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
3	23 Juni 2021	Kec. Batu Ampar	Pasar Batu Ampar	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
4	30 Agustus 2021	Kec. Bati Bati	Pasar Bentok	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
5	16-Sep-21	Kec. Batu Ampar	Petani	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
6	27-Sep-21	Kec. Bajuin	Petani	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
7	4 Oktober 2021	Kec. Batu Ampar	Petani	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)
8	6 Oktober 2021	Kec. Bajuin	Petani	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)

9	2 Nopember 2021	Kec. Bati Bati	Pasar Banua Lawas	Sampel yang diambil negative mengandung zat/bahan yang berbahaya (pestisida dan formalin)

Secara garis besar kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan berupa pembinaan dan pengawasan keamanan pangan mencakup pasar-pasar, kebun milik masyarakat/ petani yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan mengambil sample produk bahan pangan yang selanjutnya dilakukan pengujian bahan tersebut dengan menggunakan Rapi Test untuk mengetahui adanya kandungan pestisida dan formalin. Untuk tahun 2021 telah dilakukan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan (cabe besar, cabe kecil, tomat) dan daging ayam. Hasil pemeriksaan menggunakan test kit pestisida dan formalin dari semua sample yang diambil menunjukkan hasil negative (-). Hasil ini belum mencerminkan keseluruhan Kabupaten karena masih sedikitnya lokasi yang diambil sebagai sample. Ideal sample yang diambil untuk menunjukkan validitas hasil adalah semua kecamatan diambil sample dan lokasi kebun warga / masyarakat mewakili jumlah sample yang seharusnya.

Tingkat kinerja terhadap indikator hasil (outcome) dari kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan tahun 2021 adalah mencapai 85%, hal ini disebabkan kondisi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut yang masih tinggi sehingga kegiatan sosialisasi keamanan pangan baik di sekolah maupun di desa sama sekali tidak dapat dilaksanakan, karena tidak diperbolehkan untuk berkumpul lebih dari 10 orang dalam suatu acara/ kegiatan. Untuk tahun 2021 kegiatan Peringatan Hari Pangan Sedunia juga tidak dilaksanakan.

Kegiatan lain yang masih bisa dilaksanakan adalah pembinaan, evaluasi dan monitoring pada Kelompok Wanita Tani dan pelaku usaha.



6. Eselon III (Kabid Pengembangan Usaha Perikanan)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	%	2,5	2,83

	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau	%	2,5	0,97
--	--	---	-----	------

Indikator Kinerja Persentase Produksi Perikanan Budidaya air tawar. Target Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2021 adalah 331,93 Ton, Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Air Tawar sebesar 2,83 % dari target, jumlah produksi perikanan budidaya air tawar mencapai 341,31 ton, diperoleh dari produksi kolam, keramba dan jaring apung. Pada Tahun 2020 Jumlah Produksi budidaya air tawar sebesar 331,93 Ton, Persentase Peningkatan Produksi Budidaya air Tawar Tahun 2021 terhadap tahun 2020 sebesar 2,83 %, meningkat dari target produksi sebesar 2,5 %

Peningkatan produksi budidaya air tawar tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terutama komoditas ikan lele dan nila dikarenakan meningkatnya budidaya ikan lele kolam terpal serta budidaya ikan nila di kolam tanah dan jaring apung.

Kegiatan pembenihan di kabupaten tanah laut baru terdata 14 UPR. Kegiatan pembenihan berada di kecamatan Batu Ampar, Tambang Ulang, Bati-Bati, dan Pelaihari dengan komoditasnya adalah ikan lele

Tabel Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Tahun	Perikanan Budiaya Air Tawar (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	223,70		
2018	238,43	14,73	6,30
2019	325,65	87,22	36,58
2020	331,93	6,28	1,93
2021	341,31	9,38	2,83

Adapun kendala perikanan budidaya air tawar yang ada adalah sebagai berikut;

No.	KENDALA	SOLUSI
1	permodalan	Kemitraan dan perbankan

2	pemasaran	membentuk koperasi, kemitraan, promosi
3	penguasaan teknik budidaya	kepesertaan pelatihan/diklat teknis,
		pembinaan dan kunjungan dari instansi terkait dan penyuluh
		uji kompetensi pembudidaya
4	pakan	harga pakan yang cenderung mahal bisa diatasi dengan membuat pakan sendiri dengan bahan/alat yang ada di sekitar/lingkungan.
		Menggunakan pakan alternatif/tambahan
5	bibit unggul	disarankan untuk membeli bibit ikan yang bersertifikasi
6	pokdakan belum berbadan hukum	disarankan kepada kelompok membuat badan hukum agar bisa mengakses bantuan baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah
		fasilitasi kelompok untuk membuat dokumen berbadan hukum baik dari pemerintah daerah atau dari pihak swasta/perusahaan di sekitar
		swadaya kelompok
7	database/listing RTP perikanan budidaya	kegiatan pembuatan database RTP Perikanan budidaya di fasilitasi oleh pemerintah daerah tahun anggaran 2019.
		Tersusunnya up dating data RTP dan Produksi Budidaya Perikanan kabupaten tanah laut yang lebih signifikan
8	peningkatan mutu dan kualitas produksi perikanan budidaya	pendampingan dan audit CBIB untuk kegiatan pembesaran dan CPIB untuk kegiatan pembenihan

Peningkatan produksi perikanan budiday air payau pada tahun 2021 adalah sebesar 2,5 % yang berada pada angka 1.045 ton dibanding pada tahun 2020 yang hanya berada pada angka 1020 ton dengan komoditas budidaya berupa udang windu, bandeng dll. Tidak meningkatan produksi pada budidaya air payau pada tahun 2021 di banding tahun 2020 karena adanya peningkatan kegiatan di sektor perikanan budidaya air payau. Produksi tambak di kabupaten tanah laut berpotensi meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tambak dan rehab infrastruktur tambak.

Tabel produksi perikanan budidaya air payau

Tahun	Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	933,76		
2018	963,01	29,25	3,13
2019	1004,,33	41,32	4,3
2020	1020,22	15,89	1,58
2021	1045,47	25,25	2,45

Keluaran kegiatan dalam rangka mendukung capaian program

No.	Keluaran	Awal	Perubahan I (Rasionalisasi)	Perubahan II
1	Bimbingan teknis pembudidaya ikan	✓	x	x
2	Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Benar	✓	x	x
3	Fasilitasi Kemitraan	✓	x	x
4	Updating data produksi perikanan budidaya	✓	✓	✓
5	Pembinaan dan pengembangan desa produksi perikanan budidaya	✓	x	x
6	Pengadaan alat uji kualitas air	x	x	✓
7	Fasilitasi pemeriksaan sampel penyakit ikan	x	x	✓
8	Buku saku pembudidaya ikan	x	x	✓

Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan

Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Olahan hasil Perikanan tahun 2021 realisasi sebesar 1757 ton dari target produksi olahan hasil perikanan sebesar 1647 Ton, persentasi tersebut dibawah dengan target produksi

sebesar 2.5 % dan hasil perolehan tahun 2021 sebesar 0,94 %, jadi menurun sebesar 1,06 % dari target produksi olahan sebesar 2.5 %.

Hasil tersebut didapat dari meningkatnya olahan ikan kering, kerupuk, amplang, undang rebon (Papai), terasi dan undang beku serta olahan lainnya.

Nama produksi	Target	Perolehan	Persentase
Produksi olahan hasil perikanan	1647 ton	1757 ton	0,94 %

Tabel Produksi Olahan Perikanan

Tahun	Produksi Olahan Perikanan (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	1096		
2018	1199	103	9,40
2019	1360	161	13,40
2020	1647	287	21,11
2021	1757	110	0,94

Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan tersebut antara lain ;

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	28.884.120,00	100	25.680.600,00	88,91
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.230.076,00	100	47.949.676,00	82,35

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.736.500,00	100	211.212.340,00	78,01
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.572.500,00	100	22.102.300,00	86,43
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	150.618.520,00	100	124.055.829,00	82,36

6.1 Eselon IV (Kasi Perikanan Budidaya)

Terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya pada air tawar pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 yang berasal dari budidaya pada kolam air tenang, keramba dan jaring apung dengan komoditas berupa ikan lele, patin, mas, nila, betok/papuyu dan gurame.

Kegiatan pembenihan di Kabupaten Tanah laut dilaksanakan oleh 14 UPR yang tersebar di Kecamatan Tambang Ulang, Bati-Bati, Batu Ampar dan Jorong

Tabel Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Tahun	Perikanan Budiaya Air TAWAR (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
2017	223,70		

2018	238,43	14,73	6,30
2019	325,65	87,22	36,58
2020	331,93	6,28	1,93
2021	341,31	9,38	2,82

Adapun kendala perikanan budidaya air tawar yang ada adalah sebagai berikut

No.	KENDALA	SOLUSI
1	Permodalan	Melalui kemitraan dan perbankan khususnya melalui program gapuran karomah
2	Pemasaran	Membentuk kemitraan dengan pemasar, membentuk kelompok budidaya ikan serta promosi
3	Penguasaan teknik budidaya	Latihan, kunjungan, diskusi dan penyuluhan serta pelatihan
4	Pakan	Penggunaan pakan alternatif selain pelet
5	Bibit unggul	Disarankan untuk membeli bibit dari indukan yang berkualitas
6	Kelompok pembudidaya ikan belum memiliki badan hukum	Fasilitasi dan pendampingan dalam pembentukan badan hukum oleh penyuluh perikanan
7	Database / listing RTP Perikanan Budidaya	Melakukan listing serta pencatatan data produksi perikanan budidaya ketika melaksanakan latihan, kunjungan, diskusi dan pelatihan ke pembudidaya ikan

8	Peningkatan mutu dan kualitas produksi	Pendampingan secara sistematis oleh penyuluh perikanan serta didukung oleh Dinas melalui kegiatan serta bantuan sarpras budidaya ikan
---	--	---

Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau pada tahun 2021 adalah sebesar 2,45 % yang berada pada angka 1.045 ton dibanding pada tahun 2020 yang hanya berada pada angka 1020 ton dengan komoditas budidaya berupa udang windu, bandeng dll.

Peningkatan produksi pada budidaya air payau pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 karena adanya peningkatan kegiatan di sektor perikanan budidaya air payau. Produksi tambak di kabupaten tanah laut berpotensi meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tambak dan rehab infrastruktur tambak.

Tabel produksi perikanan budidaya air payau

Tahun	Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	933,76		
2018	963,01	29,25	3,13
2019	1004,,33	41,32	4,3
2020	1020,22	15,89	1,58
2021	1045,47	25,25	2,45

Peningkatan produksi di tahun 2020 sedikit di bawah target kenaikan tahunan, hal ini di karenakan di tahun 2021 terjadi musibah banjir di kabupaten tanah laut. Dimana banjir tersebut menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan yang hasil budidaya nya masih belum sempat di panen. Hal itu di

tanggulangi oleh pemerintah dengan memberikan bantuan bibit atau benih kepada pembudidaya ikan di kabupaten tanah laut baik melalui dana APBD maupun APBN untuk kemabali dapat meningkatkan nilai produksi.

Program pendukung sasaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan pembudidayaan ikan	270.736.500	78	100
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	28.884.120	84,45	100
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	58.829.476	80,42	100

Keluaran kegiatan dalam rangka mendukung capaian program

No.	Keluaran	Awal	Perubahan
1	Hibah prasarana pembudidaya ikan lele dan patin (4 pokdakan)	✓	✓
2	Pelatihan budidaya ikan di Desa Bingkulu (15 orang, usulan dari Musrenbang)	✓	✓
3	Penerbitan TDPIK (25 orang)	✓	✓

Foto kegiatan :

Kegiatan Pembenihan di salah satu UPR



Pelatihan budidaya ikan dengan



Kunjungan dan diskusi ke pembudidaya tambak terkait pendampingan dalam pembentukan koperasi



Kunjungan dan diskusi oleh Bappeda dan Dinas Perindustrian ke salah satu UPR terkait persiapan penetapan ikan lele ciri khas tanah laut



Pemberian bantuan hibah bibit ikan lele ke salah satu Kelompok Pembudidaya Ikan



Pemberian Bantuan Sarpras Budidaya ikan patin berupa waring

Pemberian bantuan berupa pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan



Kunjungan dan diskusi persiapan penilaian CBIB udang



Salah satu kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung di Bendungan Damit



Restocking berbasis budidaya ikan endemik lokal

6.2. Eselon IV Kasi Penguatan Daya Saing Produksi Kelautan dan Perikanan)

Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Olahan hasil Perikanan tahun 2021 realisasi sebesar 1757 ton dari target produksi olahan hasil perikanan sebesar 1647 Ton, persentasi tersebut kurang memenuhi target produksi sebesar 2.5 % dan hasil perolehan tahun 2021 sebesar 0,94 %, jadi kurang dari target produksi olahan sebesar 2.5 %.

Hasil tersebut didapat dari meningkatnya olahan ikan kering, kerupuk, amplang, udang rebon (Papai), terasi dan udang beku serta olahan lainnya.

Nama produksi	Target	Perolehan	Persentase
Produksi olahan hasil perikanan	1647 ton	1757 ton	0,94 %

Tabel Produksi Olahan Perikanan

Tahun	Produksi Olahan Perikanan (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	1096		
2018	1199	103	9,40
2019	1360	161	13,40
2020	1647	287	21,11
2021	1757	110	0,94

Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan tersebut antara lain ;

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	150.618.520	82,36	100
2.		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	25.572.500	86,43	100

Foto –Foto Kegiatan ;



7. Eselon III (Kabid Perikanan Tangkap)

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap perairan laut	%	2,5	59.964
	persentase produksi perikanan tangkap perairan umum	%	2,5	4.581,1

Indikator Kinerja jumlah produksi perikanan tangkap perairan laut Target produksi tahun 2021 sebesar 56.798 Ton, terealisasi 59.964 Ton sehingga ada peningkatan produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 5,57 %, tetapi didalam target peningkatan kinerja persentasi produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 2.5 %, kemudian Indikator Kinerja jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum Target produksi tahun 2021 sebesar 4376,6 Ton, terealisasi 4.581,1 Ton sehingga ada peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 4,67 %, tetapi didalam target peningkatan kinerja persentasi produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 2.5 % maka hasil produksi di atas dari target yang telah ditentukan.

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut

Tahun	Perikanan Tangkap perairan laut (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	52824		
2018	53324	500	0.94
2019	55641	2317	4,35
2020	56886	1245	2,24
2021	59964	3078	5,57

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan umum. target produksi tahun 2021 sebesar 4376.6 ton, terealisasi sebesar 4581,1 ton, sehingga adanya peningkatan produksi perikanan umum sebesar 5,28 %. didalam target peningkatan kinerja persentase produksi perikanan

tangkap perairan umum sebesar 2,5 %, maka diatas target yang disepakati sebesar 5,28 %.

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum

Tahun	Perikanan Tangkap Perairan umum (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	3964		
2018	3977	13	0.33
2019	4333	356	8,95
2020	4339,1	6,1	0,14
2021	4581,1	242	4,67

Faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap yaitu:

1. Faktor cuaca ekstrim yang melanda daerah Kalimantan Selatan
2. Faktor sulitnya mendapatkan BBM nelayan bersubsidi
3. Sarana dan Prasana, khususnya alat tangkap yang tidak layak
4. Keberadaan SDM penyuluh yang tidak merata pada kecamatan Pesisir
5. Kualitas SDM nelayan yang masih bersifat Tradisional, masih orientasinya untuk kebutuhan rumah tangga
6. Faktor Elegal fishing yang merusak ekosistem Sumberdaya Perikanan
7. Kurangnya informasi akses permodalan dari perbankan

Adapun dukungan kegiatan tahun anggaran 2021 antara lain

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumberdaya Perikanan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	330.170.406	61.74	100%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	72.787,740	85.83	100%
		Pelaksanaan Fasilitas	44.980,600	91.87	100%

		Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			
	Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan	120.295,996	48.81	100%
	Pengelolaan penangkapan ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	619.999.994	42.48	100%

7.1. Eselon IV (Kasi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan)

Sesuai dalam program, kegiatan yang diemban pada kasi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan ada 2 Kegiatan antara lain Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Fasilitasi peningkatan kompetensi dan pemberdayaan nelayan perikanan tangkap dan Pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan

Kegiatan tersebut hanya mendukung terlaksananya peningkatan indikator kinerja pada bidang perikanan tangkap yang mana semua dalam bentuk kegiatan kenelayanan dan pengendalian dapat terjalan, walaupun pada masa pandemic Covid-19, aktifitas dilapangan para nelayan masih dapat memenuhi aktifitas kesehariannya.

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2018 – 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1.	Jumlah pelatihan penanganan hasil tangkapan	3 Kali

		2.	Jumlah kegiatan pembinaan KUB	10 Kali
2.	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Perikanan	1.	Jumlah rapat evaluasi kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan diperairan umum	36 Kali

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2018 – 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1. Jumlah pelatihan penanganan hasil tangkapan	3 Kali	100%
		2. Jumlah kegiatan pembinaan KUB	10 Kali	100%
2.	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Perikanan	1. Jumlah rapat evaluasi kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan diperairan umum	36 Kali	100%

7.2. Kasi (Sarana dan Prasarana Penangkapan)

Sesuai dalam program, kegiatan yang diemban pada Kasi Sarana dan Prasarana Penangkapan, program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan (DAK) berjalan dan terjadi refofusing di kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap dan hanya ada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan (DAK) dan berjalan dengan lancar dengan memenuhi indikator kinerja yang telah disepakati

Indikator Kinerja jumlah produksi perikanan tangkap perairan laut Target produksi tahun 2020 sebesar 55.641 Ton, terealisasi 56.886 Ton sehingga ada peningkatan produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 2,24 %, tetapi didalam target peningkatan kinerja persentasi

produksi perikanan tangkap perairan laut sebesar 2.5 %, maka hasil produksi di bawah dari target yang telah ditentukan.

Tabel Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut

Tahun	Perikanan Tangkap perairan laut (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	52824		
2018	53324	500	0.94
2019	55641	2317	4,35
2020	56886	1245	2,24
2021	59964	3078	5,57

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Perairan umum. target produksi tahun 2020 sebesar 4.333 ton, terealisasi sebesar 4.339,1 ton, sehingga adanya peningkatan produksi perikanan umum sebesar 5,57 %. didalam target peningkatan kinerja persentase produksi perikanan tangkap perairan umum sebesar 2.5 %, maka diatas dari target yang disepakati sebesar 3,07 %.

Tabel Produksi Perikanan Tangkap

Tahun	Perikanan Tangkap Perairan umum (Ton)	Kenaikan (Ton)	%
1	2	3	4
2017	3964		
2018	3977	13	0.33
2019	4333	356	8,95
2020	4339,1	6,1	0,14
2021	4581,1	242	4,67

Sesuai dalam program, kegiatan yang diemban pada kasi Kenelayanan dan Pengendalian Penangkapan Ikan ada 2 Kegiatan antara lain Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan

Facilitasi peningkatan kompetensi dan pemberdayaan nelayan perikanan tangkap dan Pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan

Kegiatan tersebut hanya mendukung terlaksananya peningkatan indikator kinerja pada bidang perikanan tangkap yang mana semua dalam bentuk kegiatan kenelayanan dan pengendalian dapat terjalan, walaupun pada masa pandemic Covid-19, aktifitas dilapangan para nelayan masih dapat memenuhi aktifitas kesehariannya.

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2018 – 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan pengembangan perikanan tangkap	1.	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan	44 Paket alat tangkap
2.	Melaksanakan fasilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap	1.	Jumlah data sumberdaya tangkap	1 Dokumen
		2.	Sistem informasi sumberdaya perikanan tangkap berbasis web	1 Sistem aplikasi

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2018 – 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI KINERJA
1	2	3		4	5
1	Melaksanakan pengembangan perikanan tangkap	1.	Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan	44 Paket alat tangkap	100%
2.	Melaksanakan fasilitasi dan penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap	1.	Jumlah data sumberdaya tangkap	1 Dokumen	100%
		2.	Sistem informasi sumberdaya perikanan tangkap berbasis web	1 Sistem aplikasi	100%

Foto - Foto Kegiatan ;





B. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2021

- Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi ini dipergunakan untuk membiayai seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi Belanja Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 anata Lain :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.162.456,00	100	29.373.876,00	66,51
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.125.000,00	100	1.360.000,00	64,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000,00	100	250.000,00	35,71
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.640.000,00	100	1.940.000,00	73,48
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.534.900,00	100	1.400.000,00	91,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.006.280,00	100	4.392.200,00	31,36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.990.000,00	60	4.950.000,00	19,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.909.304.060,00	100	4.407.197.816,00	74,58
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51.624.822,00	100	50.045.952,00	96,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.932.080,00	100	3.265.350,00	55,05
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.480.390,00	100	72.600.781,00	91,34
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.984.560,00	100	11.829.894,00	78,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	100	1.200.000,00	66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.909.500,00	100	182.516.771,00	76,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.120.000,00	100	1.120.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.457.200,00	100	24.054.116,00	44,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.770.416,00	100	139.992.502,00	98,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.500.000,00	100	29.111.000,00	42,50

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	100	4.258.000,00	38,71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.864.000,00	100	23.865.134,00	95,98
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.014.770.256,00	100	1.014.770.256,00	100,00
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	109.188.060,00	100	105.165.000,00	96,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	152.597.416,00	100	43.602.176,00	28,57
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	60.263.000,00	100	42.739.144,00	70,92
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	70.960.410,00	100	52.334.590,00	73,75
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80.250.000,00	100	65.850.000,00	82,06
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106.015.142,00	90	73.568.090,00	69,39
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	523.850.116,00	95	345.577.037,00	65,97
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	211.381.520,00	65	72.633.324,00	34,36
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	202.378.876,00	100	133.081.868,00	65,76
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	57.728.000,00	90	35.973.151,00	62,31
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.347.170,00	100	20.761.500,00	73,24
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	120.295.996,00	100	58.712.014,00	48,81
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	619.999.994,00	100	263.406.800,00	42,48
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	72.757.740,00	100	62.446.023,00	85,83

Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	44.980.600,00	100	41.324.286,00	91,87
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	28.884.120,00	100	25.680.600,00	88,91
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.230.076,00	100	47.949.676,00	82,35
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.736.500,00	100	211.212.340,00	78,01
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	330.170.406,00	100	203.850.462,00	61,74
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.572.500,00	100	22.102.300,00	86,43

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	150.618.520,00	100	124.055.829,00	82,36
	11.035.882.082	98,85	8.061.519.858	73,05

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka perhitungan LAKIP dilakukan dengan menggunakan formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), formulir Penetapan Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana didalam penyusunan LAKIP dengan sistem ini cara pengukuran kinerja diarahkan untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian sasaran yang terkait, pengukuran kinerja. Ada beberapa hal yang perlu disikapi terhadap pencapaian target kinerja indikator dalam pencapaian strategis diantaranya adalah :

Secara global hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis capaian kinerja maka pada tahun 2021 ini menunjukkan capaian kinerja secara kualitatif sebesar 98,85%. Hasil ini sebagian belum mencapai target sasaran yang maksimal pada tahun bersangkutan yang telah ditetapkan pada DPA, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan pemikiran, solusi dan peningkatan serta perbaikan atas sajian Lapkin tersebut dimasa yang akan datang.

Adapun hasil (out-come) kegiatan tahun anggaran 2021, sesuai sasaran target yang yang tertuang Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu adanya kesimpulan analisa atas capaian kinerja tersebut dalam batasan target yang kan dicapai oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut dengan memperhatikan hal hal atau faktor-faktor kendala yang harus dicermati diantaranya adalah :

1. Kesesuaian Renstra tahun 2018 – 2023 yang di breakdown lima tahun ke depan dari tahun ketahun, untuk target terhadap capaian kinerja perlu dievaluasi terhadap besaran kapasitas baik berupa angka-angka ataupun ukuran, volume, produk harus dilakukan pencermatan kembali.
2. Ukuran secara produksi hasil perikanan secara umum sesuai hasil IKU yang telah ditampilkan pada Bab III tersebut telah menunjukkan adanya penurunan

produksi perikanan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, iklim yang tidak kondusif, fluktuasi harga pasar yang tidak menentu, kondisi kapal yang sudah semakin tua, adanya regulasi yang masih membatasi hak-hak para nelayan dalam menangkap ikan termasuk alat tangkap yang dipergunakan.

3. Untuk kegiatan pendukung administrasi perkantoran, dengan program pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 897.660.936,- dan terealisasi sebesar Rp. 802.543.479,- atau sebesar 89.40 % dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 95 %. Hal ini menunjukkan untuk kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan secara optimal sesuai target dan rencana kerja yang baik dalam merealisasikan kegiatan tersebut, sehingga target indikator berupa out come dapat terpenuhi keberadaannya.
4. Untuk kegiatan penunjang lainnya berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 telah berjalan secara optimal dengan persentase keuangan dan fisik cukup baik, hanya saja ada beberapa faktor kendala pula yang harus disikapi pada saat itu berupa adanya regulasi peraturan dari permendagri seperti hal tersebut diatas terkait keberadaan bantuan hibah pada masyarakat yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Tanah Laut. Terbatas.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

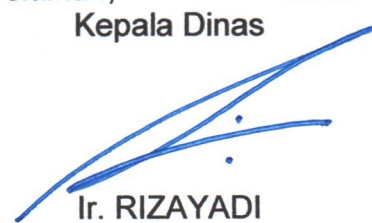
Strategi peningkatan kinerja yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyempurnakan rumusan dalam pencapaian target dan sasaran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan memanfaatkan stakeholder yang terkait dalam meningkatkan komoditi sektor produksi perikanan dan pendapatan yang selaras.
2. Pemanfaatan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu adanya pencermatan dan azas manfaat serta tingkat kebutuhan riil yang benar-benar dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

3. Selektivitas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus benar-benar konsisten untuk dilaksanakan dan penuh tanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.
4. Pencermatan terhadap skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi modal utama dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaan sesuai tugas dan fungsi.

Demikian laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, sebagai bahan informasi gambaran kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target indikator dan sasaran strategis.

Pelaihari, 2022
Kepala Dinas



Ir. RIZAYADI
NIP.19621104 199403 1 003

Lampiran ;

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Renstra (2018-2023)
5. Matrik Keselarasan

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / formula	Penanggung jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Pangan
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun } n - 1} \times 100$	Bidang Perikanan tangkap dan budidaya
			$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - (n - 1)}{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun } n - 1} \times 100$	

Target dan Capaian IKU

No	Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ton	43.419 Ton 114 % Surplus	133.196	206,77	Penurunan persentase surplus ketersediaan pangan dari tahun 2020 (berdasarkan ASEM)
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Ton	56.708	64.545,1	13,82	Perikanan Tangkap
		Ton	1162	1384,39	19,14	Perikanan Budidaya



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan majemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. RIZAYADI**
Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUKAMTA**
Jabatan : **Bupati Tanah Laut**

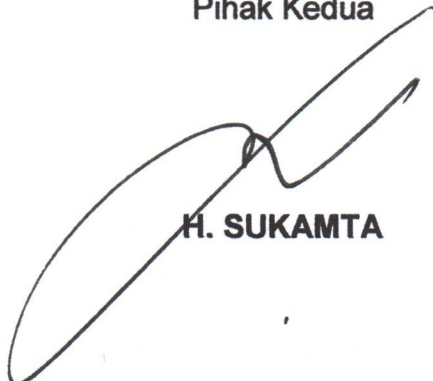
Selaku atas pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama benjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2021

Pihak Kedua



H. SUKAMTA

Pihak Pertama



Ir. RIZAYADI
NIP. 19621104 199403 1 003

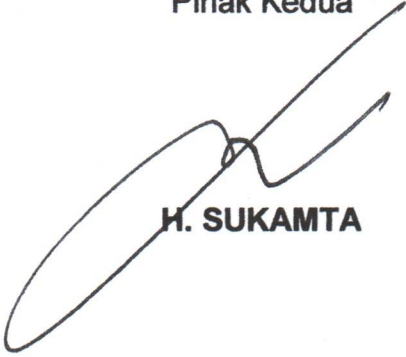
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 – 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	1 %
2	Meningkatnya Produksi perikanan	Persentase produksi perikanan	2.5 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	90.158.636
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.972.054.492
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	342.106.530
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	198.347.616
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	104.364.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	749.288.236
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp.	214.040.130
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp.	202.668.032
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp.	694.845.41
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	248.003.166
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	160.716.080
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	120.295.996
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	117.768.340
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp.	29.920.600

		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	58.230.076
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp.	270.736.500
8	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Rp.	248.208.656
9	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp.	25.572.500
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp.	150.920.870

Pihak Kedua


H. SUKAMTA

Pelaihari, Januari 2021
Pihak Pertama


Ir. RIZAYADI
NIP. 19621104 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI**

JABATAN : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**

JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Sekretaris

Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003

Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI

NIP. 19641206 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Kenaikan nilai saki dinas ketahanan pangan dan perikanan	100%
2	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100%
3	Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100%

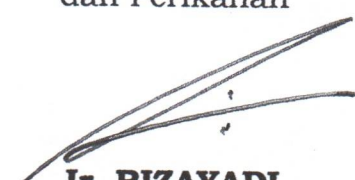
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.	90.158.636,-
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.	5.972.054.492,-
		Administrasi umum perangkat daerah	Rp.	342.106.530,-
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	198.347.616
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	104.364.000,-

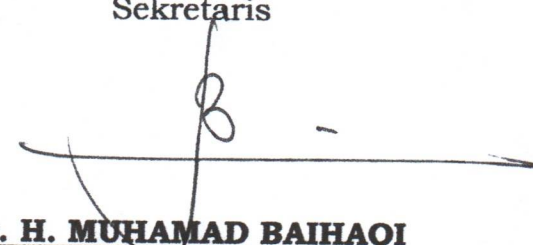
Pelaihari,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Sekretaris


Ir. RIZAYADI
NIP. 19621104 199403 1 003


Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **EMILIANI SAUDAH, SE**
JABATAN : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI**
JABATAN : Sekretaris
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Pelaihari,

2021

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ir. H. BAIHAQI

NIP. 19641206 199403 1 004

EMILIANI SAUDAH, SE

NIP. 19710626 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Menyusun data kepegawaian ,evaluasi serta administrasi kepegawaian	1.	Jumlah dokumen kepegawaian yang dilayani secara tertib	100%
2	Merencanakan dan pengadaan sarana dan prasarana seta administrasi perkantoran	2.	Jumlah dokumen sektretariat yang terkait sarana dan prasarana	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	198.347.616,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	104.364.000,-
		Administrasi umum perangkat daerah	Rp.	342.106.530,-

Pelaihari,

2021

Sekretaris

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004



EMILIANI SAUDAH, SE
NIP. 19710626 199003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **M. NOVIANSYAH, S.Pi**

JABATAN : Kasubag Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI**

JABATAN : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Sekretaris

Kasubag Perencanaan

Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004

M. NOVIANSYAH, S.Pi
NIP. 19771126 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	3 Dokumen
		2	Jumlah Laporan SKPD	3 Laporan

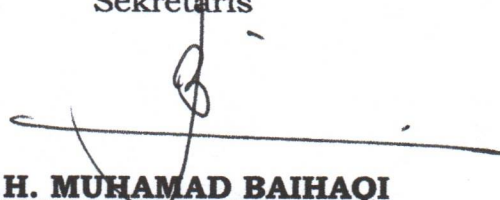
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	90.158.636,-

Pelaihari,

2021

Sekretaris

Kasubag Perencanaan


Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004


M. NOVIANSYAH, S.Pi
NIP. 19771126 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **USWATUN HASANAH, S.Pd**

JABATAN : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI**

JABATAN : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Sekretaris

Kasubag Keuangan

Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004

USWATUN HASANAH, S.Pd
NIP. 19691216 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

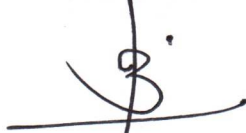
NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan	1. Jumlah dokumen keuangan pemerintah daerah	1 Dok

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.972.054.492,-

Pelaihari,

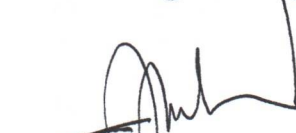
2021

Sekretaris



Ir. H. MUHAMAD BAIHAQI
NIP. 19641206 199403 1 004

Kasubag Keuangan



USWATUN HASANAH, S.Pd
NIP. 19691216 199203 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Hj. EKO SUBIYANTI, SKM**
JABATAN : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**
JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

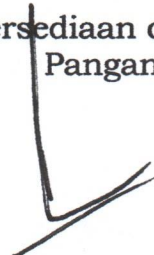


Ir. RIZAYADI

NIP. 29621104 199403 1 003

Pelaihari, 2021

Kabid Ketersediaan dan Distribusi
Pangan



Hj. EKO SUBIYANTI, SKM

NIP. 19650812 198903 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2014 – 2018	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1. Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan Kabupaten	Rasio diatas 114% (Surplus)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 749.288.236,-
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp. 248.003.166,-
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan	Rp. 214.040.130,-
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 202.668.032,-

Pelaihari,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Kabid Ketersediaan dan Distribusi
Pangan



Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003



Hj. EKO SUBIYANTI, SKM

NIP. 19650812 198903 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **MOHAMMAD HARI, SP**
JABATAN : Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Hj. EKO SUBIYANTI, SKM**
JABATAN : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Ketersediaan dan Distribusi
Pangan

Hj. EKO SUBIYANTI, SKM
NIP. 19650812 198903 2 013

Pelaihari, 2021
Kasi Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan

MOHAMMAD HARI, SP
NIP. 19670706 200704 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	Jumlah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	4 Unit
		2.	Jumlah dokumen penyusunan data kerawanan pangan/SKPG	2 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	749.288.236,-
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Rp.	248.003.166,-

Pelaihari,

2021

Kabid Ketersediaan dan Distribusi
Pangan

Kasi Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan

Hj. EKO SUBIYANTI, SKM
NIP. 19650812 198903 2 013

MOHAMMAD HARI, SP
NIP. 19670706 200701 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Hj. WIWIEK AGUSTINA, SP**
JABATAN : Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

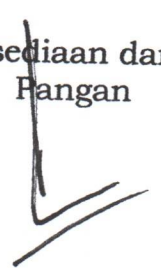
NAMA : **Hj. EKO SUBIYANTI, SKM**
JABATAN : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

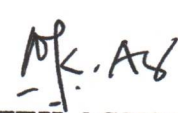
Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan


Hj. EKO SUBIYANTI, SKM
NIP. 19650812 198903 2 013


Hj. WIWIEK AGUSTINA, SP
NIP. 19830821 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Distribusi dan Penyediaan Cadangan Pangan di masyarakat	1. Jumlah Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Lumbung cadaangan pangan pemerintah	7500 Kg 1 Gudang

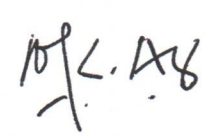
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan	Rp. 214.040.130,-
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 202.668.032,-

Pelaihari, 2021

Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan


Hj. EKO SUBIYANTI, SKM
NIP. 19650812 198903 2 013


HJ. WIWIEK AGUSTINA, SP
NIP. 19830821201001 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Ir. H.AKHMAD FARHAN**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**
JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Kabid Konsumsi dan Keamanan
Pangan



Ir. RIZAYADI

NIP. 29621104 199403 1 003



Ir. H.AKHMAD FARHAN

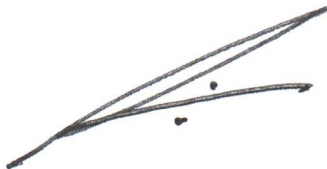
NIP. 19630405 199203 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1.	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	90 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Masyarakat dan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Traget konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Rp.	694.845.412
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	160.716.080

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003

Pelaihari,

2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan



Ir. H.AKHMAD FARHAN

NIP. 19630405 199203 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**
JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 6 September 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Kabid Konsumsi dan Keamanan
Pangan

Ir. RIZAYADI
NIP. 29621104 199403 1 003

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP
NIP. 19671020 199012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1.	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	90 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Masyarakat dan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Rp.	735.231.636
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tercapainya pengawasan keamanan pangan segar	Rp.	86.075.170

Pelaihari, 6 September 2021

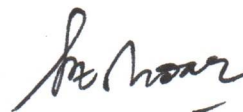
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan



Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP

NIP. 19671020 199012 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **SARI NARULITA, S.Pi**
JABATAN : Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. H.AKHMAD FARHAN**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan
Pangan

Kasi Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan

Ir. H.AKHMAD FARHAN
NIP. 19630405 199203 1 013

SARI NARULITA, S.Pi
NIP. 19790914 200604 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 – 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Keamanan Pangan dan Konsumsi Pangan local	1. Jumlah sarana pengawasan keamanan pangan segar	5 Jenis

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 160.716.080

Kabid Konsumsi dan Keamanan,
Pangan



Ir. H. AKHMAD FARHAN
NIP. 19630405 199203 1 013

Pelaihari, 2021
Kasi Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan



SARI NARULITA, S.Pi
NIP. 19790914 200604 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **SARI NARULITA, S.Pi**
JABATAN : Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 6 September 2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan
Pangan

Kasi Keamanan dan Kewaspadaan
Pangan

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP
NIP. 19671020 199012 2 001

SARI NARULITA, S.Pi
NIP. 19790914 200604 2 030

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 – 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Melaksanakan Keamanan Pangan dan Konsumsi Pangan lokal	1.	Jumlah Sarana pengawasan keamanan pangan segar	5 Jenis

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	86.075.170

Pelaihari, 6 September 2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kasi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP
NIP. 19671020 199012 2001



SARI NARULITA, S.Pi
NIP. 19790914 200604 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **RAHMADI,SP.M.P.H**
JABATAN : Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. H.AKHMAH FARHAN**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama.**

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kepala Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan

Kasi Konsumsi dan
Penganekaragaman Pangan

Ir. H.AKHMAH FARHAN
NIP. 19630405 199203 1 013

RAHMADI,SP.M.P.H
NIP. 19690705 199102 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 – 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya pola pangan harapan	1.	Nilai skor pola pangan harapan (PPH)	90%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Rp.	694.845.412

Pelaihari,

2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kasi Konsumsi dan penganekaragaman Pangan



Ir. H. AKHMAD FARHAN
NIP. 19630405 199203 1 013



RAHMADI, SP.M.P.H
NIP. 19690705 199102 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **RAHMADI,SP.M.P.H**
JABATAN : Kasi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP**
JABATAN : Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 6 September 2021

Kepala Bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan

Kasi Konsumsi dan
Panganekaragaman Pangan

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP
NIP. 19671020 199012 2 001

RAHMADI,SP.M.P.H
NIP. 19690705 199102 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

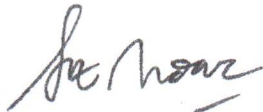
NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya pola pangan harapan	1.	nilai skor pola pangan harapan (PPH)	90%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Masyarakat dan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Rp.	735.231.626

Pelaihari, 6 September 2021

Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kasi Konsumsi dan penganekaragaman Pangan



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, MAP
NIP. 19671020 199012 2001



RAHMADI, SP.M.P.H
NIP. 19690705 199102 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **AHMANI, S.Pi**

JABATAN : Kabid Pengembangan Usaha Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**

JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Kabid Pengembangan Usaha
Perikanan

Ir. RIZAYADI

NIP. 29621104 199403 1 003

AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan	1.	Persentase meningkatnya produk olahan hasil perikanan	2,5 %
2	Meningkatnya produksi budidaya ikan	2.	Persentase meningkatnya produksi budidaya ikan	2,5 %

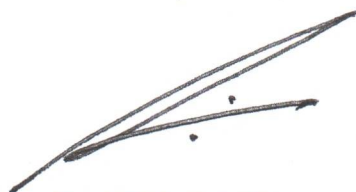
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp.	25.572.500,-
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp.	150.920.870,-
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp.	29.920.600,-
		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	58.230.076,-
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp.	270.736.500,-

Pelaihari,

2021

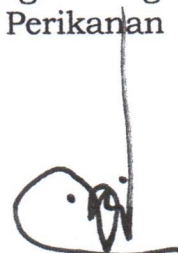
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabid Pengembangan Usaha Perikanan



Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003



AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **H. JULI MAHMUD, S.Pi**

JABATAN : Plt. Kasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **AHMANI, S.Pi**

JABATAN : Kabid Pengembangan Usaha Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Pengembangan Usaha
Perikanan

AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013

Pelaihari, 2021

Plt. Kasi Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

H. JULI MAHMUD, S.Pi

NIP. 19780707 201406 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Pembinaan/peningkatan mutu diverifikasi produk kelautan dan perikanan	1.	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	5 Kali
2	Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat	1.	Jumlah Identifikasi Unit Pengolahan Ikan Untuk Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	4 unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Rp.	25.572.500,-
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Rp.	150.920.870,-

Pelaihari,

2021

Kabid pengembangan usaha perikanan

Plt. Kasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan



AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013



H. JULI MAHMUD, S.Pi

NIP. 19780707 201406 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **M. REZI AKBAR, S.St, Pi**

JABATAN : Kasi Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **AHMANI, S.Pi**

JABATAN : Kabid Pengembangan Usaha Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kabid Pengembangan Usaha
Perikanan

Kasi Perikanan Budidaya

AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013

M. REZI AKBAR, S.St, Pi

NIP. 19850704 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Melaksanakan peningkatan produksi perikanan budidaya	1.	Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan	15 Orang
		2.	Jumlah penerbitan TDPIK	25 Berkas
		3.	Jumlah prasarana pembudidaya ikan lele	2 Pokdakan
		4.	Jumlah prasarana pembudidaya ikan patin	2 Pokdakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp.	29.920.600,-
		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	58.230.076,-
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp.	270.736.500,-

Pelaihari,

2021

Kabid Pengembangan Usaha
Perikanan



AHMANI, S.Pi

NIP. 19690806 199303 1 013

Kasi Perikanan Budidaya



M. REZI AKBAR, S.St, Pi

NIP. 19850704 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **NOOR IRWANDY KODRATILLAH,S.PI**
JABATAN : Kabid Perikanan Tangkap
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **Ir. RIZAYADI**
JABATAN : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Kabid Perikanan Tangkap

Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003

NOOR IRWANDY KODRATILLAH,S.PI

NIP.19770906 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1.	Persentase meningkatnya Produksi Perikanan tangkap perairan laut	2.5 %
		2.	Persentase meningkatnya produksi perikanan tangkap perairan umum	2.5 %

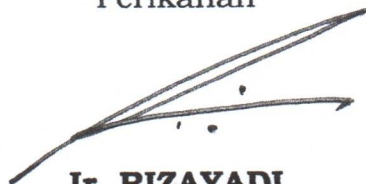
NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp.	120.295.996,-
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	117.768.340,-
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp.	248.208.656,-

Pelaihari,

2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabid Perikanan Tangkap



Ir. RIZAYADI

NIP. 19621104 199403 1 003



NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.PI

NIP.19770906 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **EDY SANTOSO, S.Pi**
JABATAN : Kasi Kenelayanan dan Pengendalian
Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.PI**
JABATAN : Kabid Perikanan Tangkap
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2021

Kabid Perikanan tangkap

Kasi Kenelayanan dan Pengendalian
Penangkapan Ikan,

NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.PI
NIP. 19770906 200604 1 016

EDY SANTOSO, S.PI
NIP.19761028 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1. Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	1 Tahun
2.	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Perikanan	1. Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan	6 Kali

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 117.768.340,-
2.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp. 248.208.656,-

Pelaihari,

2021

Kabid Perikanan
Tangkap

Kasi Kenelayanan dan Pengendalian
Penangkapan Ikan,

NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.PI
NIP.19770906 200604 1 016

EDY SANTOSO, S.PI
NIP. 19761028 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **ANDRY KURNIAWAN, S.Pi**
JABATAN : Kasi Sarana dan Prasarana Penangkapan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : **NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.Pi**
JABATAN : Kabid Perikanan Tangkap
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Perikanan tangkap

NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.Pi
NIP. 19770906 200604 1 016

Pelaihari, 2021

Kasi Sarana dan Prasarana
Penangkapan,

ANDRY KURNIAWAN, S.Pi
NIP.19760923 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN) TAHUN 2019 - 2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan	1 Tahun
2.	Melaksanakan Fasilitas dan penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap	1. Terlaksananya informasi sumberdaya perikanan tangkap berbasis web	1 Sistem

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota	Rp. 120.295.996

Pelaihari,

2021

Kabid. Perikanan
Tangkap

Kasi Sarana dan Prasarana
Penangkapan,

NOOR IRWANDY KODRATILLAH, S.PI

NIP.19770906 200604 1 016

ANDRY KURNIAWAN, S.PI

NIP. 19760923 200501 1 008

**Matrik Pohon Kinerja (Cascading Kinerja)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut**

Tujuan
Tercapainya peningkatan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan
Meningkatnya produksi perikanan
terwujudnya peningkatan tatakelola administrasi perikanan

Kinerja utama Kepala Dinas
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat
Indikator
-Persentase ketersediaan pangan masyarakat

Kinerja utama Kepala Dinas
Meningkatnya produksi perikanan
Indikator
- Persentase produksi perikanan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kinerja : Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
Indikator Kinerja
- Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Kinerja : Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat
Indikator Kinerja
- Persentase Meningkatnya Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Masyarakat

Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Kinerja : meningkatnya produksi perikanan tangkap
Indikator Kinerja
- Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan umum

Kepala bidang Pengembangan Usaha Perikanan
Kinerja :
1. meningkatnya produksi perikanan budidaya
2. meningkatnya Jumlah Olahan hasil perikanan
Indikator Kinerja
- Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar
- Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau
- Produk Olahan hasil perikanan

Sekretaris
Kinerja :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian
Indikator Kinerja
nilai setiap SKPD
persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan
persentase keterlolaanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
Kinerja :
Melaksanakan Keamanan
Pangan dan Konsumsi
Pangan Lokal
Indikator Kinerja :
Nilai skor pola pangan
harapan (PPH)

Seksi Ketersediaan dan kerawanan pangan
Kinerja :
Pengembangan Ketersediaan
dan Kerawanan Pangan
Indikator Kinerja :
Jumlah penyediaan
infrastruktur dan seluruh
pendukung kemandirian
pangan

Seksi Kelayakan dan Pengendalian Penangkapan Ikan
Kinerja :
Melaksanakan
Pengembangan Perikanan
Tangkap
Indikator Kinerja :
Jumlah
pemberdayaan nelayan kecil
Jumlah pengawasan sumber
daya perikanan

Seksi Surnas dan Prasana Penangkapan
Kinerja 1:
Melaksanakan Fasilitas dan
penyediaan prasana dan
sarana perikanan tangkap
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen data
Sumberdaya tangap
Jumlah sistem informasi
sumberdaya perikanan
tanggap berbasis web

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kinerja :
menyusun data kepegawaian
menyusun data kepegawaian
menyusun perencanaan dan
pelaporan kinerja dinas
ketahanan pangan dan
perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen
perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
kinerja
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen keuangan
pemerintah daerah

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ir. RIZYADI
NIP: 19621104 199403 1 003

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target dan Realisasi Anggaran												Tercapai dan Realisasi Kegiatan												APBD	APBD-P	Berkasah/ (Berurang)	Sisa Dana			
				Tercapaian I				Tercapaian II				Tercapaian III				Tercapaian IV				Tercapaian I			Tercapaian II			Tercapaian III						Tercapaian IV		
				T	R	%	Rp	T	R	%	Rp	T	R	%	Rp	T	R	%	Rp	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T			R	%	T
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																																	
2.09.01.2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah			11.040.814	25.00%	0.00%	8.244.400	18.00%	11.040.814	25.00%	9.388.858	18.00%	11.040.814	25.00%	12.728.818	28.00%	11.040.814	25.00%	12.728.818	28.00%	11.040.814	25.00%	12.728.818	28.00%	11.040.814	25.00%	12.728.818	28.00%	11.040.814	25.00%	44.182.456	44.182.456	0	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			531.250	25.00%	0.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	531.250	25.00%	2.125.000	2.125.000	0	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pembelian RKA-SKPD			175.000	25.00%	0.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	175.000	25.00%	700.000	700.000	0	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			660.000	25.00%	0.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	660.000	25.00%	2.840.000	2.840.000	0	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			383.725	25.00%	0.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	383.725	25.00%	1.534.800	1.534.800	0	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.501.570	25.00%	0.00%	2.842.200	18.00%	3.501.570	25.00%	750.000	5.00%	3.501.570	25.00%	1.000.000	7.14%	3.501.570	25.00%	1.000.000	7.14%	3.501.570	25.00%	1.000.000	7.14%	3.501.570	25.00%	1.000.000	7.14%	3.501.570	25.00%	14.008.280	14.008.280	0	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.247.500	25.00%	0.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	6.247.500	25.00%	24.880.000	24.880.000	0	
2.09.01.2.01.08	Administrasi Keuangan			1.477.328.015	25.00%	0.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	1.477.328.015	25.00%	5.800.304.000	5.800.304.000	0	
2.09.01.2.01.09	Penyediaan Dagang dan Jasa			12.808.207	25.00%	0.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	12.808.207	25.00%	51.824.822	51.824.822	0	
2.09.01.2.01.10	Administrasi Umum			0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	11.125.610	11.125.610	0	(11.125.610)
2.09.01.2.01.11	Administrasi Umum			1.483.020	25.00%	0.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	1.483.020	25.00%	5.832.060	5.832.060	0	
2.09.01.2.01.12	Penyediaan Perlengkapan Kantor			19.870.089	25.00%	0.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	19.870.089	25.00%	79.480.360	79.480.360	0	
2.09.01.2.01.13	Penyediaan Perlengkapan Kantor			3.746.140	25.00%	0.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	3.746.140	25.00%	14.884.560	14.884.560	0	
2.09.01.2.01.14	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan			450.000	25.00%	0.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	450.000	25.00%	1.800.000	1.800.000	0	
2.09.01.2.01.15	Penyediaan Perlengkapan Kantor			58.977.375	25.00%	0.00%	43.876.200	18.00%	58.977.375	25.00%	47.819.200	18.00%	58.977.375	25.00%	90.819.371	37.88%	58.977.375	25.00%	90.819.371	37.88%	58.977.375	25.00%	90.819.371	37.88%	58.977.375	25.00%	90.819.371	37.88%	58.977.375	25.00%	238.808.500	238.808.500	0	
2.09.01.2.01.16	Penyediaan Perlengkapan Kantor			0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0		
2.09.01.2.01.17	Penyediaan Perlengkapan Kantor			280.000	25.00%	0.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	280.000	25.00%	1.120.000	1.120.000	0	
2.09.01.2.01.18	Penyediaan Perlengkapan Kantor			13.814.300	25.00%	0.00%	10.924.574	20.00%	13.814.300	25.00%	8.880.014	12.60%	13.814.300	25.00%	6.240.528	11.46%	13.814.300	25.00%	6.240.528	11.46%	13.814.300	25.00%	6.240.528	11.46%	13.814.300	25.00%	6.240.528	11.46%	13.814.300	25.00%	54.487.200	54.487.200	0	
2.09.01.2.01.19	Penyediaan Perlengkapan Kantor			35.662.604	25.00%	0.00%	44.724.178	31.00%	35.662.604	25.00%	34.821.588	24.20%	35.662.604	25.00%	60.648.736	42.84%	35.662.604	25.00%	60.648.736	42.84%	35.662.604	25.00%	60.648.736	42.84%	35.662.604	25.00%	60.648.736	42.84%	35.662.604	25.00%	142.770.416	142.770.416	0	
2.09.01.2.01.20	Penyediaan Perlengkapan Kantor			17.125.000	25.00%	0.00%	600.000	0.80%	17.125.000	25.00%	12.816.800	18.10%	17.125.000	25.00%	15.584.400	22.81%	17.125.000	25.00%	15.584.400	22.81%	17.125.000	25.00%	15.584.400	22.81%	17.125.000	25.00%	15.584.400	22.81%	17.125.000	25.00%	68.500.000	68.500.000	0	
2.09.01.2.01.21	Penyediaan Perlengkapan Kantor			2.750.000	25.00%	0.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	2.750.000	25.00%	11.000.000	11.000.000	0	
2.09.01.2.01.22	Penyediaan Perlengkapan Kantor			6.216.000	25.00%	0.00%	6.216.000	25.00%	6.216.000	25.00%	7.915.134	31.60%	6.216.000	25.00%	15.560.000	84.19%	6.216.000	25.00%	15.560.000	84.19%	6.216.000	25.00%	15.560.000	84.19%	6.216.000	25.00%	15.560.000	84.19%	6.216.000	25.00%	24.884.000	24.884.000	0	
2.09.02	PROGRAM PENGELAAN SUMBER DAYA EKONOMI																																	
2.09.02.2.01	URUSAN KEDALIAHAN DAN PERIKANAN																																	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Perlengkapan Kantor			121.878.890	12.01%	0.00%	121.878.890	12.01%	121.878.890	12.01%	125.887.894	12.38%	121.878.890	12.01%	888.753.292	87.38%	121.878.890	12.01%	888.753.292	87.38%	121.878.890	12.01%	888.753.292	87.38%	121.878.890	12.01%	888.753.292	87.38%	121.878.890	12.01%	487.502.760	487.502.760	527.387.486	
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Perlengkapan Kantor			27.287.015	25.00%	0.00%	27.287.015	25.00%	27.287.015	25.00%	27.287.015	25.00%	27.287.015	25.00%	38.478.000	32.49%	27.287.015	25.00%	38.478.000	32.49%	27.287.015	25.00%	38.478.000	32.49%	27.287.015	25.00%	38.478.000	32.49%	27.287.015	25.00%	108.188.060	108.188.060	0	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Perlengkapan Kantor			38.148.354	25.00%	0.00%	38.148.354	25.00%	38.148.354	25.00%	38.148.354	25.00%	38.148.354	25.00%	18.000.820	11.88%	38.148.354	25.00%	18.000.820	11.88%	38.148.354	25.00%	18.000.820	11.88%	38.148.354	25.00%	18.000.820	11.88%</						

2.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT
Matrik keselarasan 2020

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)
										(12)	(13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	(5)	(6)	IKU	(8)	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kabupaten tanah laut melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; terdapatnya hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok; tercapainya peningkatan mutu dan keamanan pangan; tercapainya penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen; tercapainya penguatan lembaga distribusi pangan (DAK); tercapainya percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok	Terlaksananya pengumpulan data lumpung pangan, Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok, Terlaksananya pengisian cadangan	214.040.130
	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat			IKU		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kabupaten tanah laut melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; terdapatnya hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok; tercapainya peningkatan mutu dan keamanan pangan; tercapainya penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen; tercapainya penguatan lembaga distribusi pangan (DAK); tercapainya percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	Terlaksananya pengumpulan data lumpung pangan, Terlaksananya pemantauan harga pangan pokok, Terlaksananya pengisian cadangan	202.668.032
							Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kabupaten tanah laut melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; terdapatnya hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok; tercapainya peningkatan mutu dan keamanan pangan; tercapainya penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen; tercapainya penguatan lembaga distribusi pangan (DAK); tercapainya percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok afinitas, Terlaksananya pelatihan keterampilan, Terlaksananya peningkatan pengetahuan kelompok afinitas	749.288.236
							Program penanganan kerawanan pangan	Tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan	tercapainya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kabupaten tanah laut melalui pemberdayaan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; terdapatnya hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok; tercapainya peningkatan mutu dan keamanan pangan; tercapainya penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen; tercapainya penguatan lembaga distribusi pangan (DAK); tercapainya percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penyusunan data kerawanan pangan/SOPG	Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok afinitas, Terlaksananya pelatihan keterampilan, Terlaksananya peningkatan pengetahuan kelompok afinitas	248.003.166

Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya konsumsi pangan yang bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang bergizi, seimbang dan aman	Program pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya skor PPH	Di peroleh skor PPH kabupaten tanah laut, Terlaksananya festival pangan lokal B2SA Tl. Kabupaten dan terikutinya festival pangan lokal B2SA Tl. Provinsi dan Tl. Nasional serta meningkatnya pengetahuan peserta mengenai penyusunan menu beragam, bergizi seimbang, aman (B2SA) dengan pemanfaatan SDL, Bertambahnya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut tentang pangan lokal dan termotivasinya untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari hari, Dimanfaatkannya kebun percontohan Kabupaten dan pekarangan kantor sebagai lokasi pembelajaran pemanfaatan pekarangan, Terlaksananya lomba pemanfaatan pekarangan untuk memotivasi kelompok wanita Tani dalam memanfaatkan pekarangan, Terbinanya produsen pangan lokal di Kabupaten Tanah Laut	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Tercapainya pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, keluarga, guru, dan anak sekolah mengenai keamanan pangan, Terlaksananya lomba jalan santai dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia di Kabupaten Tanah Laut	122.574.520
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya skor PPH	Di peroleh skor PPH kabupaten tanah laut, Terlaksananya festival pangan lokal B2SA Tl. Kabupaten dan terikutinya festival pangan lokal B2SA Tl. Provinsi dan Tl. Nasional serta meningkatnya pengetahuan peserta mengenai penyusunan menu beragam, bergizi seimbang, aman (B2SA) dengan pemanfaatan SDL, Bertambahnya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut tentang pangan lokal dan termotivasinya untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari hari, Dimanfaatkannya kebun percontohan Kabupaten dan pekarangan kantor sebagai lokasi pembelajaran pemanfaatan pekarangan, Terlaksananya lomba pemanfaatan pekarangan untuk memotivasi kelompok wanita Tani dalam memanfaatkan pekarangan, Terbinanya produsen pangan lokal di Kabupaten Tanah Laut	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Tercapainya nilai skor pola pangan harapan (PPH)	Di peroleh skor PPH kabupaten tanah laut, Terlaksananya festival pangan lokal B2SA Tl. Kabupaten dan terikutinya festival pangan lokal B2SA Tl. Provinsi dan Tl. Nasional serta meningkatnya pengetahuan peserta mengenai penyusunan menu beragam, bergizi seimbang, aman (B2SA) dengan pemanfaatan SDL, Bertambahnya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut tentang pangan lokal dan termotivasinya untuk mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari hari, Dimanfaatkannya kebun percontohan Kabupaten dan pekarangan kantor sebagai lokasi pembelajaran pemanfaatan pekarangan, Terlaksananya lomba pemanfaatan pekarangan untuk memotivasi kelompok wanita Tani dalam memanfaatkan pekarangan, Terbinanya produsen pangan lokal di Kabupaten Tanah Laut	694.845.412
Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Persentase produksi perikanan tangkap perairan laut dan umum	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Persentase capaian target legalitas dokumen kapal nelayan, persentase capaian target legalitas tanah nelayan yang di fasilitasi, persentase target capaian pembinaan KUB, persentase capaian target lanjut hasil laporan kegiatan penagkapan legal fishing di perairan umum Kabupaten Tanah Laut, Persentase discunya dokumen studi kelayakan, masterplan, DED, dan RAB tersebut dalam kebijakan selanjutnya untuk pembangunan TPI di Kabupaten Tanah Laut, Berfungsinya alat tangkap secara baik dalam kegiatan penangkapan KUB nelayan,	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan	Persentase capaian target legalitas dokumen kapal nelayan, persentase capaian pelayanan BBM solar nelayan, persentase capaian target legalitas tanah nelayan yang di fasilitasi, persentase target capaian pembinaan KUB	120.295.996
2			Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Persentase capaian target legalitas dokumen kapal nelayan, persentase capaian pelayanan BBM solar nelayan, persentase capaian target legalitas tanah nelayan yang di fasilitasi, persentase target capaian pembinaan KUB, persentase capaian target lanjut hasil laporan kegiatan penagkapan legal fishing di perairan umum Kabupaten Tanah Laut, Persentase discunya dokumen studi kelayakan, masterplan, DED, dan RAB tersebut dalam kebijakan selanjutnya untuk pembangunan TPI di Kabupaten Tanah Laut, Berfungsinya alat tangkap secara baik dalam kegiatan penangkapan KUB nelayan,	Pembudayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	Persentase capaian target lanjut hasil laporan kegiatan penangkapan legal fishing di perairan umum Kabupaten Tanah Laut	117.768.340

[illegible]

Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dr. RIZAYADI

NIP. 19621104 19903 1 003

RENCANA AKSI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		ANGGARAN (Rp).	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		
	Meningkatnya Ketersediaan pangan Masyarakat	Persentase meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan di masyarakat	25%	25%	25%	25%	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok	214.040.130	Bidang Pangan
							Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	997.291.402	
							Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	749.288.236	
							Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksananya penyusunan data kerawanan pangan /SKPG	248.003.166	
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		1%		1%	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/kota	Tercapainya pengawasan keamanan pangan segar	160.716.080	Bidang Pangan
							Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Tercapainya nilai skor pola pangan harapan (PPH)	694.845.412	Bidang Pangan
	meningkatkan produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap perairan laut				2.5%	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan	120.295.996	Bidang Perikanan Tangkap
							Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	117.768.340	
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum				2.5%	Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan	248.208.656	Bidang Perikanan Tangkap
	meningkatkan produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar		5%		5%	Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil	Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	29.920.600	Bidang Perikanan budidaya
							Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan TDPIK	58.230.076	
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air payau		5%		5%	Pengelolaan pembudidaya ikan	Terlaksananya penyediaan prasarana pembudidaya ikan	270.736.500	Bidang Perikanan budidaya
	meningkatkan produk olahan hasil perikanan	peningkatan produk olahan hasil perikanan		2.5%		2.5%	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Terlaksananya penerbitan daftar usaha pengolahan hasil perikanan usaha mikro dan kecil	25.572.500	Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

									Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	150.920.870	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	kenaikan nilai sikap dinas ketahanan pangan dan perikanan					B		Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	342.106.530 198.347.616	Sekretariat
									Penelitian barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	104.364.000	
	meningkatkan kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan		25%	25%	25%	25%		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	90.158.636	Sekretariat
	meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian							Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen keuangan pemerintah daerah	5.972.054.492	

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ir. RIZAYADI
NIP. 19621104 19903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 800/ /DKKP/2022

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021;

MENGINGAT :

- 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**


Ir. RIZAYADI
NIP. 19620622 198702 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 800/ /DKPP/2022

Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020**

NO	JABATAN DLAM DINAS	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ketua
3	Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
4	Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
5	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinator
6	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Koordinasi
7	Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
8	Staf Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota

Pelaihari, Januari 2022
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut


Ir. RIZAYADI
NIP. 19620622 198702 2 002